

**PELAKSANAAN PERKAWINAN BAWAH TANGAN DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
(STUDI PADA MASYARAKAT DI KECAMATAN TONRA
KABUPATEN BONE)**

S K R I P S I



NURHIDAYAH

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2016**

**PELAKSANAAN PERKAWINAN BAWAH TANGAN DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
(STUDI PADA MASYARAKAT DI KECAMATAN TONRA
KABUPATEN BONE)**

S K R I P S I

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar
untuk memenuhi sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan**

**NURHIDAYAH
1261041003**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2016**

MOTTO

Hidup bukan hanya tentang hasil yang didapat, tetapi juga tentang bagaimana memaknai dan menghargai proses untuk mendapatkannya.

–Nurhidayah–

Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu, Selepas banyak kesabaran yang kau jalani. Yang akan membuatmu terpanan, hingga Kau lupa betapa pedihnya rasa sakit.

–Ali Bin Abi Thalib–

Karya ini ku persembahkan untuk

Ayahanda, ibunda dan adikku tercinta. Atas segala

kasih sayang, doa, pengorbanan dan dukungannya

yang selalu menjadi inspirasi bagi penulis. Serta untuk

keluarga besarku yang selalu Memberikan dorongan dan dukungan kepada penuls dalam Penyelesaian tugas akhir ini.

ABSTRAK

NURHIDAYAH, 2016. Pelaksanaan Perkawinan Bawah Tangan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Pada Masyarakat Di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone). Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Muhammad Arsyad Maf'ul dan Mustari.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1). Faktor yang mendorong terjadinya perkawinan bawah tangan pada masyarakat di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone; 2). Akibat perkawinan bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone; 3). Upaya pemerintah dalam meminimalisir perkawinan bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Tonra. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh yaitu data primer yang didapat melalui terjun langsung ke lapangan untuk wawancara dan observasi, serta data sekunder yang diperoleh dengan pengkajian beberapa literatur yang berhubungan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan bawah tangan di Kecamatan Tonra adalah: 1) Menghindari syarat dan prosedur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; 2) Kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat; 3) Dorongan orang tua; 4) Menghindari hal-hal yang dilarang agama. Adapun akibatnya yaitu : 1) Tidak dianggap istri yang sah; 2) Tidak berhak atas nafkah; 3) Terabaikan hak dan kewajibannya; 4) Rentan terjadi KDRT; 5) Istri sulit bersosialisasi; 6) Sulit mendapatkan akte kelahiran anak dan. Sedangkan upaya yang dilakukan pemerintah dalam meminimalisirnya yaitu: 1) Memberikan penyuluhan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan; 2) Memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin melakukan pencatatan perkawinan dengan menugaskan P3N di setiap desa; 3) Melakukan sosialisasi mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan lain yang terkait dengan pencatatan perkawinan melalui rapat koordinasi di tingkat Kecamatan.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi kehadiran Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan hidayahNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Perkawinan Bawah Tangan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Pada Masyarakat Di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone)”. Tak lupa shalawat dan salam selalu tercurahkan untuk Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu, Bab 1, Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian dan Manfaat Hasil Penelitian. Bab II Tinjauan Pustaka dan Kerangka konsep, Bab III Metode Penelitian, terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, deskripsi dokus, tahap-tahap kegiatan penelitian, instrument penelitian, prosedur pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, analisis data, Bab IV, Hasil penelitian dan Pembahasan terdiri dari Hasil penelitian dan pembahasan, Bab V, terdiri dari kesimpulan, implikasi dan saran.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini bukan karya penyusun semata tapi hasil dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih teristimewa disampaikan kepada kedua orang tuaku terkasih Ayahanda Muhammad Ilyas dan Ibunda Syamsiah yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan dan menjadi penasehat, pembimbing dan pendengar terbaik serta menjadi motivasi utama penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Juga kepada

adikku tercinta Muhammad Anugrah yang tak pernah berhenti memberikan dorongan semangat kepada penulis serta menjadi partner penulis dalam melakukan penelitian ini.

Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. H. Husain Syam, M.TP. selaku Rektor Universitas Negeri Makassar
2. Prof. Dr. Hasnawi Haris, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar
3. Dr. Mustari, M.Hum dan Lukman Ilham, S.Pd.,M.Pd, Ketua dan sekretaris Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar
4. Drs. Muhammad Arsyad Maf'ul, M.Si dan Dr. Mustari, M.Hum selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Drs. Mustaring, M.Hum dan Muh. Sudirman, S.Ag.,M.Pd selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan masukan dan nasehat yang sangat berharga bagi penulis.
6. Para Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar yang telah mendidik dan memberikan pelayanan kepada penulis.
7. Bapak camat Tonra dan semua staff di Kantor Kecamatan Tonra yang telah memberikan izin penelitian serta mmberikan data.

8. Bapak Kepala KUA Tonra, Abd. Wahid Arif, S.Ag., M.Pd.I dan seluruh staff KUA Tonra yang telah banyak membantu penulis, serta responden yang telah memberikan informasi.
9. Sahabat-sahabatku dari bangku sekolah, Nur Aisyah, S.Kep, Arni Ritsna Gisma, Priska Aprianti, Irnawati, Sri Ikawati Nur, Nurhandayani B.Y, Astri Handayani, A.Dewi Pertiwi, Nuryanti, Febriansa S.Pd, Nurkumalasari S.Pd dan Sulfidayanti S. Amd. Keb yang selalu memberikan dorongan semangat untuk penulis.
10. Kepada Ayahanda Dr. Muhammad Akil Musi, S.Pd., M.Pd., selaku pembina IMB, terima kasih atas bimbingan dan nasehat-nasehatnya kepada penulis. Juga kepada Reski Malindah A.Md, teman kamarku “Satriana Anil” dan seluruh keluarga besar IMB terima kasih atas bantuan dan dukungannya kepada penulis. Terkhusus kepada “My Lucky”, kakanda Asharuddin S.Pd dan sahabatku Arisa Darwis, terima kasih telah menjadi partner suka duka penulis.
11. Teman-teman KKN-PPL Angk. XI Posko SMP 12 Parepare Anggraini Pratami Putri, Fathul Jannah Askar, Wiwi Asriani, Nutfi Athmi, Elok Cahyanti, Kak A.Asrar Nur, Muh. Nasir, Burhanuddin, dan terkhusus kepada “Awalia Indrawati” cerita kita selalu punya tempat tersendiri di hati.
12. Saudara-saudaraku yang tak seayah dan seibu, Ahmad Akhyar Abdul Ahad, Sumarni B., Dian Eka Safitri, Fitriani Basri, Irma Indriani, Nani Irmayani, Bripda Niem Sukmawarni Akil, Nurmiati, Sarina, Sitti Rugaya,

dan Hardiyanti Bahar, terima kasih untuk saling support dan terima kasih telah menjadikan hari-hari penulis menjadi berwarna selama kuliah di UNM. Juga kepada teman-teman seperjuangan PPKn 2012 yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terima kasih untuk kalian semua atas kebersamaan kita selaman 4 tahun ini, semoga silaturahmi tetap terjalin.

13. Kepada Ahmad Zuhudy yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan semangat dan doa, tidak pernah bosan mendengar keluhan-keluhan penulis, serta selalu sabar dan ikhlas dalam mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk selalu ada.
14. Kepada kak Sukri dan kak Dilla yang banyak membantu penulis selama kuliah di Universitas Negeri Makassar.
15. Kepada keluarga besarku dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebut satu persatu terima kasih atas dukungan dan doanya.

Penulis tidak mungkin mampu membalas semua budi baik yang telah semua pihak berikan, hanya ribuan terima kasih teriring doa yang mampu penulis sampaikan. Semoga segala kebaikan dan keikhlasan semua pihak mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

Akhirnya penulis berharap semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisabermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Makassar, Juni 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR BAGAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEP	8
A. Tinjauan Pustaka	8
1. Pengertian Perkawinan.....	8
a. Perkawinan Menurut Hukum Islam	8
b. Perkawinan Menurut Hukum Adat	11
c. Perkawinan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974.....	13
2. Rukun Dan Syarat Perkawinan	15
3. Bentuk-Bentuk Perkawinan	19
4. Perkawinan Bawah Tangan.....	22
a. Pengertian Perkawinan Bawah Tangan.....	22
b. Faktor-Faktor Pendorong Perkawinan Bawah Tangan	25
c. Dampak Perkawinan Bawah Tangan	30
5. Pencatatan Perkawinan.....	32
B. Kerangka Konsep	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian	41
C. Deskripsi Fokus.....	41
D. Tahap-Tahap Penelitian	42
E. Sumber Data.....	42
F. Instrumen Penelitian.....	43
G. Prosedur Pengumpulan Data	43

H. Pengecekan Keabsahan Data.....	44
I. Analisis Data	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Hasil Penelitian	46
1. Sekilas Tentang Kecamatan Tonra.....	46
2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Bawah Tangan Pada Masyarakat Di Kecamatan Tonra.....	51
3. Akibat Yang Ditimbulkan Perkawinan Bawah Tangan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Di Kecamatan Tonra	56
4. Upaya-upaya pemerintah dalam meminimalisir terjadinya perkawinan bawah tangan di Kecamatan Tonra	59
B. Pembahasan.....	61
1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Bawah Tangan Pada Masyarakat Di Kecamatan Tonra.....	61
2. Akibat Yang Ditimbulkan Perkawinan Bawah Tangan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Di Kecamatan Tonra	68
3. Upaya-upaya pemerintah dalam meminimalisir terjadinya perkawinan bawah tangan di Kecamatan Tonra	74
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Implikasi.....	81
C. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA	83
----------------------	----

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 1.	Data luas desa/kelurahan	47
Tabel 2.	Data jumlah penduduk laki-laki dan perempuan	48
Tabel 3.	Data penduduk dirinci menurut agama	49

DAFTAR BAGAN

Nomor	Judul	Halaman
Bagan 1.	Bagan kerangka konsep	39

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Usulan Judul Skripsi
2. Rekomendasi Tim Pengarah Gagasan Awak Penulisan Skripsi
3. Persetujuan Judul dan Pembimbing
4. Lembar Persetujuan Ujian Proposal
5. Surat Tanda Terima Naskah dan Persetujuan Seminar Proposal
6. Surat Undangan Seminar Proposal
7. Kartu Kontrol Seminar Proposal
8. Surat Lembar Pengesahan Jilid
9. Surat Pengesahan Judul Skripsi dan Pembimbing
10. Surat Permintaan Izin Penelitian
11. Surat Permintaan Izin Penelitian Dari BKPMMD Provinsi SulSel
12. Surat Pengantar Bersedia Menerima Penelitian Dari KUA Kec. Tonra
13. Surat Izin Penelitian Dari BP2T Kabupaten Bone
14. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian Dari KUA Kec. Tonra
15. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian Di Kecamatan Tonra
16. Surat Permohonan Seminar Hasil
17. Tanda Terima Persetujuan Seminar Hasil
18. Surat Undangan Seminar Hasil
19. Kartu Kontrol Seminar Hasil
20. Surat Persetujuan Ujian Skripsi
21. Tanda Terima Persetujuan Ujian Skripsi
22. Surat Undangan Ujian Skripsi

- 23. SK Dekan
- 24. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- 25. PP Nomor 9 Tahun 1975
- 26. Pedoman Wawancara
- 27. Daftar Informan
- 28. Dokumentasi
- 29. Riwayat Hidup

DAFTAR INFORMAN

PELAKU

1. Nama : Hasnah
Umur : 37 Tahun
Pekerjaan : IRT
Pendidikan : SMP
2. Nama : Suriani
Umur : 31 Tahun
Pekerjaan : IRT
Pendidikan : SD
3. Nama : Isya
Umur : 68 Tahun
Pekerjaan : IRT
Pendidikan : SD
4. Nama : A
Umur : 40 Tahun
Pekerjaan : Buruh bangunan
Pendidikan : SMA
Nama : L
Umur : 37 Tahun
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan : SMA
5. Nama : S
Umur : 30 Tahun
Pekerjaan : Petani

Pendidikan : SMP

Nama : N

Umur : 28 Tahun

Pekerjaan : Petani

Pendidikan : SMA

6. Nama : B

Umur : 31 Tahun

Pekerjaan : Buruh bangunan

Pendidikan : SMP

Nama : H

Umur : 26 Tahun

Pekerjaan : Buruh Tani

Pendidikan : SD

7. Nama : U

Umur : 31 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMA

Nama : M

Umur : 33 Tahun

Pekerjaan : IRT

Pendidikan : SD

8. Nama : R

Umur : 69 Tahun

Pekerjaan : Nelayan

Pendidikan : SD

Nama : N
Umur : 65 Tahun
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SD

KEPALA KUA

Nama : Abd. Wahid, S.Ag, M.Pd
Umur : 54 Tahun
Pekerjaan : Kepala KUA Tonra
Pendidikan : S2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan telah berlangsung sejak manusia pertama diciptakan oleh Allah SWT. Adam dan Hawa adalah makhluk pertama mendambakan kehidupan bersama. Meskipun Adam tinggal di dalam Surga yang serba ada dan berkecukupan, ia merasa kesepian sehingga Allah menciptakan pasangan hidupnya yang terbuat dari tulang rusuknya sebelah kiri.

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Manusia tidak seperti binatang yang melakukan perkawinan bebas dan sekehendak nafsunya. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti peraturan yang berlaku.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Demikian perumusan perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974.

Dalam pandangan Islam perkawinan adalah masalah (urusan) agama yang sekaligus tercakup di dalamnya berbagai persoalan yang terjadi secara bersamaan pada saat pelaksanaan perkawinan seperti hubungan keperdataan atau kekeluargaan dan kekerabatan, hubungan kewarisan dan berbagai

hubungan sosial kemanusiaan yang terjadi akibat terlaksananya suatu perkawinan. Begitu banyak persoalan sosial kemasyarakatan yang muncul akibat pelaksanaan suatu perkawinan, maka sudah barang tentu urusan perkawinan harus dilihat dan ditangani dari berbagai sudut persoalan sosial kemasyarakatan dan atau sudut pandang hukum yang mengatur tentang perkawinan yang terjadi di negara hukum seperti di Indonesia.

Idealnya suatu perkawinan yang sah menurut Islam yaitu perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan. Hal ini berbeda dengan pandangan peraturan perkawinan Indonesia yang menyatakan bahwa perkawinan itu harus dicatatkan, perkawinan yang tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.” Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.”¹

Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan

¹Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan. Pencatatan setiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum kedalam suatu akta resmi (surat keterangan) yang dimuat dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus untuk itu.²

Pada kenyataannya, tidak semua masyarakat Islam di Indonesia mengikuti prosedur atau aturan pencatatan perkawinan tersebut. Masih banyak masyarakat yang melaksanakan praktik nikah namun tidak mencatatkannya secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak dipublikasikan atau yang biasa dikenal dengan perkawinan bawah tangan.

Akibat hukum dari perkawinan bawah tangan, meski secara agama dianggap sah, namun perkawinan bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak dianggap sah dimata hukum negara. Mereka yang melaksanakan perkawinan bawah tangan ini berpandangan bahwa nikah atau kawin itu adalah urusan agama, agamalah yang dapat melegitimasi terhadap sah tidaknya suatu perkawinan.

Pandangan seperti yang telah disebut di atas kalau dilihat dari segi sah atau tidaknya perkawinan secara syari'at agama (hukum Islam) memang benar (sah), namun perlu dipahami bahwa kita hidup dan berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang walaupun sebagian besar penduduknya beragama Islam dan tetap menjalankan berbagai hukum syari'at

² Sayuti Thalib, *Hukum kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta; Penerbit UI Press) Hal. 75

Islam dalam oleh aturan dan hukum Negara (hukum positif) yang berlaku bagi seluruh masyarakat dan rakyat Indonesia.

Akibat hukum perkawinan tersebut berdampak sangat merugikan bagi istri serta bagi anak yang dilahirkan baik secara hukum, sosial dan psikologi. Salah satu dampaknya yaitu, istri tidak dianggap sebagai istri yang sah. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan jika suami meninggal dunia. Selain itu, keterangan berupa status sebagai anak diluar nikah dan tidak tercantumnya nama ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi anak dan ibunya.

Walaupun perkawinan di Indonesia telah diatur dengan lahirnya Undang-Undang tentang Perkawinan, namun secara *defacto* pelaksanaan perkawinan oleh masyarakat Indonesia masih banyak yang melangsungkan perkawinan bawah tangan, baik dikalangan masyarakat biasa maupun para pejabat ataupun artis. Tidak terkecuali pada masyarakat Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, keadaan masyarakatnya masih banyak yang melangsungkan perkawinan bawah tangan dengan berbagai macam alasan dan faktor yang sering diungkapkan ketika ingin melaksanakan pernikahan yang sah secara hukum positif Indonesia. Sebagaimana hasil observasi awal yang dilakukan dengan wawancara kepada Kepala KUA Kecamatan Tonra bahwa terdapat

beberapa kasus perkawinan bawah tangan yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Tonra Kabupaten Bone.³

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik dengan adanya hal-hal tersebut. Dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai fenomena tersebut. Dengan demikian penulis akan membahasnya dalam judul “PELAKSANAAN PERKAWINAN BAWAH TANGAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI PADA MASYARAKAT DI KECAMATAN TONRA KABUPATEN BONE”.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis mencoba merumuskan persoalan dalam bentuk pertanyaan:

1. Faktor apa yang mendorong terjadinya perkawinan bawah tangan pada masyarakat di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone ?
2. Bagaimana akibat perkawinan bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tonra Kabupaten Bone ?
3. Bagaimana upaya pemerintah dalam meminimalisir terjadinya perkawinan bawah tangan di tengah-tengah masyarakat khususnya di kalangan masyarakat Kecamatan Tonra Kabupaten Bone ?

³ Hasil wawancara kepada Abd. Wahid Arif, S.Ag., M.Pd.I (Kepala KUA) pada tanggal 07 Januari 2016

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong masyarakat di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone melakukan perkawinan bawah tangan.
2. Untuk mengetahui akibat perkawinan bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tonra Kabupaten Bone.
3. Untuk mengetahui apa upaya pemerintah dalam meminimalisir terjadinya perkawinan bawah tangan di tengah-tengah masyarakat khususnya di kalangan masyarakat Kecamatan Tonra Kabupaten Bone.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan terutama dibidang hukum dan menambah karya ilmiah yang telah ada, serta dapat menjadi acuan dalam suatu penelitian yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.
- 2) Memberikan sumbangan bagi para praktisi, yaitu para ulama, hakim, pengadilan agama, notaris, penasehat hukum maupun masyarakat Islam pada umumnya dalam menghadapi kasus-kasus perkawinan dibawah tangan.
- 3) Untuk memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone dan meminimalisir angka perkawinan dibawah tangan di daerah tersebut.

b. Manfaat Praktis

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan/ wawasan penulis di bidang penelitian ilmiah, khususnya di bidang hukum dan keluarga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEP

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti *nikah* atau *Zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi.⁴

Sungguh sudah banyak para ahli mengemukakan pengertian perkawinan. Salah satu diantaranya adalah Sulaiman Rasyid menurut beliau, perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang atara keduanya bukan merupakan *muhrim* hal senada dikemukakan oleh Mahmud Yunus, perkawinan adalah akad antara calon suami-sitri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.⁵

Menurut sebagian ulama Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis”. Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, “nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau title bagi suatu akad

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta; Kencana, 2006), hal 37

⁵Abd Kadir Ahmad, *Sistem Perkawinan Di Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat*, (Makassar: Indobis, 2006), Hal. 17

yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata”. Oleh mazhab Syafi’ah, nikah dirumuskan dengan “akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh menggunakan redaksi (lafal) *inkah* atau *tazwij*; atau turunan (makna) dari keduanya”. Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan nikah tangan “akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata *inkah* atau *taswij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang)”.⁶

Definisi perkawinan dalam fiqih memberikan kesan bahwa perempuan ditempatkan sebagai objek kenikmatan bagi laki-laki. Yang dilihat pada diri wanita adalah aspek biologisnya saja. Ini terlihat dalam penggunaan kata *al-wat'* atau *al-istimta'* yang semuanya berkonotasi seks. Bahkan mahar yang semula pemberian ikhlas sebagai tanda cinta seorang laki-laki kepada perempuan juga didefinisikan sebagai pemberian yang mengakibatkan halalnya seorang laki-laki berhubungan seksual dengan wanita. Implikasi lebih jauh akhirnya perempuan menjadi pihak yang dikuasai oleh laki-laki seperti yang tercermin dalam berbagai peristiwa-peristiwa perkawinan.⁷

Perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan.

1) Perkawinan dilihat dari segi hukum.

⁶Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta; Raja Grafindo, 2004), hal. 45

⁷Amir Nurdin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2004), hal. 45

Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Oleh Q.IV: 21 dinyatakan “..perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat”, disebut dengan kata-kata “*mitsaaqaan ghaliizaan*”. Juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian karena adanya:

- a) Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dengan syarat dan rukun tertentu.
- b) Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talaq, kemungkinan fasaqh, dan sebagainya.

2) Segi sosial dari suatu perkawinan

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

- 3) Pandangan dari suatu perkawinan dari segi agama suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling minta menjadi pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah sebagai diingatkan Q. IV. : 1. ⁸

⁸Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), Hal. 49

b. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Pengertian perkawinan menurut hukum adat adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga baru yang nantinya akan menghasilkan keturunan, yang mana perkawinan ini bersangkut paut dengan masalah kedudukan, harta kekayaan dan masalah pewarisan.⁹

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan rumah tangga, tetapi juga suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri dan para anggota kerabat dari pihak suami. Terjadinya perkawinan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja. Tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.

Dengan terjadinya perkawinan, maka diharapkan agar dari perkawinan itu didapat keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat, menurut garis ayah atau garis ibu atau garis orang tua. Adanya

⁹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), Hal. 217

silsilah yang menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat, adalah merupakan barometer dari asal-usul keturunan seseorang yang baik dan teratur.

Menurut Hukum Adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan Perdata tetapi juga merupakan “Perikatan Adat”. Perkawinan dalam arti “Perikatan Adat” ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Menurut Teer Haar bahwa perkawinan ini adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan menyangkut urusan keagamaan¹⁰.

Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban orang tua termaksud anggota keluarga, kerabat menurut hukum adat setempat yaitu dengan pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelenggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terlibat dalam perkawinan. Sejauh mana ikatan perkawinan itu membawa akibat hukum “Perikatan Adat” seperti tentang kedudukan suami atau kedudukan istri, begitu pula tentang kedudukan anak dan pengangkatan anak, kedudukan anak tertua anak anak penerus keturunan, anak adat, anak asuh dan lain-lain; dan harta perkawinan tergantung pada bentuk dan sistim perkawinan adat setempat.

¹⁰ Soerojo Wignjodipoero, *Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1988) Hal. 55

Menurut Hukum Adat di Indonesia perkawinan itu dapat berbentuk dan bersistim perkawinan jujur dimana pelamaran dilakukan pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan, isteri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami hal ini biasa dijumpai di (Bantul, Lampung, Bali) kemudian “Perkawinan Semanda” dimana pelamar dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan setelah perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman istri hal ini bisa dijumpai di daerah (Minangkabau, Semendo Sumatera Selatan) dan perkawinan bebas yaitu di (Jawa, Mencil, Mentas) dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria dan setelah perkawinan kedua suami istri bebas menentukan tempat kedudukan dan kediaman mereka, menurut kehendak mereka, yang terakhir ini banyak berlaku dikalangan masyarakat keluarga yang telah maju (Modern).¹¹

c. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

UU perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskannya dengan :

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Bandung: Bandar Maju), Hal. 8

¹² Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari rumusan di atas yaitu :

- a) Yang dimaksud ikatan lahir bathin adalah bahwa ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau bathin saja. Akan tetapi kedua-duanya harus terpadu erat. Suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, dengan kata lain hal itu disebut dengan hubungan formal, hubungan formal ini nyata baik bagi perihal mengikatkan dirinya maupun bagi pihak ketiga. Sebaliknya suatu ikatan bathin merupakan hubungan yang tidak formal, yaitu suatu ikatan yang tidak nampak, tidak nyata yang hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, ikatan bathin merupakan dasar ikatan lahir. Ikatan bathin ini yang dapat dijadikan dasar pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia.
- b) Maksud dari seorang pria dan seorang wanita adalah bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Dengan demikian, maka kesimpulan yang dapat ditarik yaitu bahwa hubungan perkawinan selain antara pria dan wanita tidaklah mungkin terjadi misalnya antara seorang pria dengan pria atau seorang wanita dengan wanita. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang saat ini telah dilegalkan oleh beberapa Negara Barat.

- c) Sedangkan suami istri mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya istilah “hidup bersama”.
- d) Dalam definisi tersebut disebut pula tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang erat hubungannya dengan keturunannya, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.
- e) Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Maka bagi bangsa Indonesia suatu perkawinan dinilai bukan hanya untuk memuaskan nafsu biologis semata akan tetapi merupakan sesuatu yang sakral. Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa rumusan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 merupakan rumusan perkawinan yang telah disesuaikan dengan masyarakat Indonesia, dasar falsafah negara Pancasila dan UUD 1945.

2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Pada pelaksanaan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat

perkawinan. Kalau salah satu syarat-syarat perkawinan tetapi tidak terpenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Terkait dengan sahnya suatu perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan:

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan seperti tersebut diatas juga dijelaskan kembali pada bagian penjelasan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yaitu “dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”.

Dari penjelasan itu dapat diambil kesimpulan bahwa sah atau tidaknya perkawinan itu tergantung pada ketentuan agama dan kepercayaan dari masing-masing individu atau orang yang akan melaksanakan perkawinan tersebut. Syarat perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab suatu perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang. Maka perkawinan tersebut dapat diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan.

Syarat-syarat perkawinan terdapat pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- 1) Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan suatu perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya,

maka izin dimaksudkan ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyampaikan kehendaknya.

- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendak, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yaitu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Sedangkan pada pasal 7 disebutkan:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dengan Pasal 6 ayat (6).

Adapun yang termasuk rukun perkawinan ialah: (a) Pihak-pihak yang melaksanakan akad nikah, yaitu mempelai pria dan wanita; (b) Wali; (c) Saksi; (d) Akad nikah.

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka sahnya suatu perkawinan menurut hukum agama di Indonesia sangat menentukan. Apabila suatu perkawinan tidak dilakukan menurut agamanya masing-masing berarti perkawinan tersebut tidak sah.

Perkawinan yang dilakukan di Kantor Catatan Sipil atau di Pengadilan tanpa dilakukan terlebih dahulu menurut hukum agama tertentu berarti tidak sah.

Menurut hukum Islam, suatu perkawinanda dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, yaitu¹³ :

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya yaitu: (a) Beragama islam; (b) Laki-laki; (c) Jelas orangnya; (d) Dapat memberikan persetujuan; (e) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Calon isteri, syarat-syaratnya yaitu: (a) Beragama islam; (b) Perempuan; (c) Jelas orangnya; (d) Dapat diminta persetujuannya; (e) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya yaitu: (a) Laki-laki; (b) Dewasa; (c) Mempunyai hak perwakilan; (d) Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya yaitu: (a) Minimal dua orang laki-laki; (b) Hadir dalam ijab qabul; (c) Dapat mengerti maksud akad; (d) Islam; (e) Dewasa.
- 5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya yaitu: (a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali; (b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai; (c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut; (d) Antara ijab dan qabul bersambungan; (e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya; (f) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah; (g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri

¹³Mardani, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), Hal. 10

minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Sedangkan mahar (maskawin) kedudukannya sebagai kewajiban perkawinan dan sebagai syarat sahnya perkawinan bila tidak ada mahar, maka pernikahannya menjadi tidak sah. Dasarnya adalah Q.S An-Nisa ayat 4 dan 24.

3. Bentuk-Bentuk Perkawinan

Ada beberapa jenis-jenis perkawinan yang dapat kita cermati secara universal, diantaranya :

- 1) Perkawinan Poligami, yaitu suatu perkawinan dimana seorang suami mempunyai istri lebih dari satu (poligini) atau seorang wanita yang menikahi beberapa laki-laki (poliandri)
- 2) Perkawinan Egenis yaitu suatu bentuk perkawinan yang bertujuan untuk memperbaiki atau memuliakan ras.
- 3) Perkawinan Periodik atau Term Marriage yaitu dua orang yang akan melibatkan diri dalam suatu relasi atau hubungan yang sangat intim dan mencobanya terlebih dahulu selama satu periode tertentu, jika dalam satu periode itu kedua belah pihak bisa saling menyesuaikan atau merasa cocok barulah dilakukan ikatan perkawinan yang permanen.
- 4) Perkawinan Persekutuannya itu pola perkawinan yang menganjurkan dilaksanakannya perkawinan tanpa anak, dengan melegalisasi keluarga berencana atau KB atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

Ada pula macam-macam perkawinan menurut Islam yaitu diantaranya adalah :

- 1) Nikah Syighor; seorang wali mengawinkan putrinya dengan seorang laki-laki dengan tanpa mahar. Point terpenting dalam bentuk pernikahan ini adalah tanpa mahar. Kesepakatan tanpa mahar ini merupakan hal yang bathil berkaitan dengan mahar, yang paling berhak menentukan maharnya adalah pengantin perempuan dan harus diserahkan kepada pengantin perempuan, bukan walinya
- 2) Nikah Mut'ah/ Kawin Kontrak; menikah dalam waktu tertentu saja sesuai dengan kesepakatan dalam akadnya. Mut'ah berarti nikmat, nikah mut'ah adalah nikah yang bertujuan mencari kenikmatannya saja.
- 3) Nikah Muhallil; nikah yang mengakali hukum Allah. Dalam Islam, seseorang yang sdah mentalaq istrinya sebanyak tiga kali maka ia tidak boleh lagi rujuk kepada istrinya tersebut pernikahan muhalil adalah pernikahan sandiwara yang bertujuan untuk melepaskan larangan tersebut (menghalalkan).
- 4) Pernikahan dengan ahli kitab, tidak ada perbedaan pendapat bahwa wanita muslim haram hukumnya menikah dengan pria ahli kitab. Sementara untuk sebaliknya, mengenai laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab ada perbedaan pendapat; Boleh, dengan dalil-dalil Q.S Al-Maidah: 5, dilakukan oleh beberapa sahabat. Tidak boleh, dengan alasan bahwa wanita-wanita Yahudi sekarang ini bukan wanita ahli kitab.

Bentuk-bentuk perkawinan :

1) Menurut Jumlah Istri/ Suami

1. Monogami; suatu bentuk perkawinan dimana si suami tidak menikah dengan perempuan lain dan si istri tidak menikah dengan lelaki lain. Jadi singkatnya monogami merupakan nikah antara seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa adanya ikatan pernikahan lain.
2. Poligami; bentuk perkawinan dimana seorang pria menikahi beberapa wanita (poligini) atau seorang wanita menikah dengan beberapa pria (poliandri).

2) Menurut Asal Istri/ Suami

1. Endogami; suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang sama.
2. Eksogami; suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang berbeda.

3) Menurut Hubungan Kekerabatan Persepupuan

1. Cross Cousin; bentuk perkawinan anak-anak dari kakak beradik yang berbeda jenis kelaminnya.
2. Parallel Cousin; bentuk perkawinan anak-anak dari kakak beradik yang sama jenis kelaminnya.

4) Menurut Pembayaran Mas Kawin/ Mahar

1. Mahar / Mas Kawin Barang Berharga
2. Mahar / Mas Kawin Uang

3. Mahar / Mas Kawin Hewan / Binatang Ternak, dan lain lain.

Dari semua bentuk-bentuk perkawinan yang telah disebutkan diatas, secara umum perkawinan terbagi menjadi dua jenis yaitu perkawinan yang tercatat dan ada pula perkawinan yang tidak dicatatkan. Perkawinan yang tercatat yaitu perkawinan yang dilaksanakan dengan mencatatkannya ke kantor catatan sipil atau KUA. Sedangkan perkawinan yang tidak dicatatkan atau yang biasa juga dikenal dengan perkawinan dibawah tangan yaitu perkawinan yang dilakukan secara sah dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam Islam namun tidak dicatatkan di kantor pencatatan sipil.

4. Perkawinan Bawah Tangan

a. Pengertian Perkawinan Bawah Tangan

Dalam masalah pernikahan, kita sering mendengar istilah nikah bawah tangan. Yang dimaksudkan dengan perkawinan bawah tangan disini adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia yang memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan tetapi tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah seperti yang diatur dan ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menurut istilah beberapa hakim di Pengadilan Agama dikatakan :

Perkawinan bawah tangan itu atau perkawinan liar tersebut oleh sebagian umat Islam dianggap sah menurut hukum agama, walaupun tidak didaftarkan atau dicatat pada Kepala KUA setempat.¹⁴

¹⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2006), Hal. 71

Secara materiil perkawinan bawah tangan adalah sah karena telah dipenuhinya persyaratan perkawinan menurut hukum syariat Islam, tapi secara formil yuridis tak memenuhi persyaratan ketentuan yang diatur dalam UU Perkawinan dan peraturan pelaksanaanya, sehingga bisa dianggap tidak sah dihadapan hukum.

Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Hal ini tentu memberikan gambaran bagi kita tiap-tiap perkawinan di bawah tangan memiliki kewajiban bagi kedua mempelai untuk mencatatkan perkawinannya di Departemen Agama tempat mereka melangsungkan perkawinan.

Sehubungan dengan tersebut diatas, hingga kini kalangan teoritis dan praktisi hukum masih bersilang pendapat tentang pengertian yuridis sahnya suatu perkawinan. Ada dua pendapat para pakar hukum mengenai masalah ini:

- a) Bahwa sahnya suatu perkawinan semata-mata hanya harus memenuhi pasal 2 ayat (1) UU perkawinan tersebut, yakni perkawinannya telah dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam secara sempurna (memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah yan umumnya dianggap standar oleh dunia Islam. Mengenai pencatatan nikah oleh

PPN, tidaklah merupakan syarat sahnya nikah, tetapi hanya kewajiban administratif saja.

- b) Bahwa sahnya suatu akad nikah harus memenuhi ketentuan UU Perkawinan pasal 2 ayat (1) mengenai tata cara agama dan ayat (2) mengenai pencatatan nikahnya oleh PPN secara simultan. Dengan demikian, ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tersebut merupakan syarat kumulatif, bukan alternatif. Karena itu, perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan syariat Islam tanpa pencatatan oleh PPN, belumlah dianggap sebagai perkawinan yang sah. Dan perkawinan inilah yang kemudian setelah berlakunya UU Perkawinan secara efektif tanggal 1 Oktober 1975 terkenal dengan sebutan “Perkawinan di bawah tangan”.¹⁵

Dalam PP No.9 Tahun 1975, yang merupakan peraturan tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan bagi penganut Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat, dari mulai pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan sampai penandatanganan tersebut berarti proses pencatatan perkawinan telah selesai. Bagi yang melangsungkan pernikahan tanpa memberi tahu kepada pegawai pencatat, atau melaksanakan pernikahan tidak dihadapan pegawai pencatat, dapat dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).¹⁶

¹⁵Dikutip dari <http://iskandar-islam-indonesia.blogspot.co.id>, *nikah-sirri-nikah-di-bawah-tangan*, pada Tanggal 17 Januari 2016

¹⁶Repubik Indonesia, Pasal 45 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975

b. Faktor-Faktor Pendorong Perkawinan Bawah Tangan

Apabila kita mencermati dinamika pelaksanaan perkawinan bawah tangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka kita akan mengetahui berbagai faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan bawah tangan di tengah-tengah masyarakat yang bukan semakin hari semakin surut, tetapi justru semakin hari semakin bertambah. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya perkawinan bawah tangan karena disebabkan beberapa faktor :¹⁷

1) Faktor biaya nikah tinggi

Ada keluhan dari masyarakat bahwa biaya pencatatan perkawinan di KUA tidak transparan, beberapa biaya sesungguhnya secara normatif. Oleh karena dalam praktik masyarakat yang melakukan perkawinan, dikenai biaya yang beragam. Adanya kebiasaan yang terjadi di masyarakat, bahwa seorang mempelai laki-laki selain ada kewajiban membayar mahar, juga harus menanggung biaya pesta perkawinan yang cukup besar (meskipun hal ini terjadi menurut adat kebiasaan), alasan ini pula yang menjadi penyebab laki-laki yang ekonominya belum mapan lebih memilih menikah dengan cara diam-diam, yang penting halal alias ada saksi tanpa harus melakukan pesta seperti umumnya pernikahan, alasan tersebut sebelum diterbitkan PMA Nomor 46 tentang Pengelolaan PNPB atas biaya NR.

¹⁷ Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Jurnal Kepenghuluan Volume 1 Nomor 1 Juli-November 2015*. (Makassar : Kemenag, 2015) Hal 99

2) Faktor belum cukup umur

Perkawinan bawah tangan dilakukan karna adanya salah satu calon mempelai belum cukup umur, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita (Pasal 17 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974). Kasus ini terjadi karena disebabkan alasan ekonomi juga, dimana orang tua merasa kalau anak perempuannya sudah menikah, maka beban keluarga secara ekonomi menjadi berkurang, karena anak perempuannya sudah ada yang naggung/ngurusi yaitu suaminya.

3) Faktor ikatan dinas/kerja atau sekolah

Adanya ikatan dinas/kerja atau peraturan sekolah yang tidak membolehkan menika karena dia bekerja selama waktu yang tertentu sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati, atau karena masih sekolah maka tidak boleh menikah dulu sampai lulus. Kalau kemudian menikah, maka akan dikeluarkan dari tempat kerja atau sekolah, karena dianggap sudah melanggar aturan.

4) Faktor pemahaman terhadap sah tidaknya suatu perkawinan

Pemahamannya yang penting sudah nikah menurut agama, soal pencatatan itu hanya tertib administrasi. Di antara masyarakat ada yang memahami bahwa pencatatan perkawinan tidak memiliki hubungan dengan sah tidaknya sebuah perkawinan, dan hal itu yang dipraktekkan oleh sebagian masyarakat dengan melaksanakan praktek perkawinan bawah tangan tanpa melibatkan PPN.

5) Faktor hamil diluar nikah, sebagai efek pergaulan bebas

Akibat dari pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, yang tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah-kaidah agama sehingga terjadi hamil diluar nikah. Kehamilan yang terjadi diluar nikah tersebut, merupakan aib bagi keluarga yang akan mengundang cemoohan dari masyarakat. Dari sanalah orang tua menikahkan anaknya secara sembunyi dengan laki-laki yang menghamilinya dengan alasan nama baik keluarga dan tanpa melibatkan petugas PPN tetapi hanya dilakukan oleh seorang yang dianggap memahami persoalan nikah (persoalan agama) tanpa melakukan pencatatan.

6) Faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan

Hal tersebut dimungkinkan karena belum maksimalnya sosialisasi tentang pencatatan perkawinan yang dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat terutama orang tua dan para remaja calon pengantin. Dengan pemahaman masyarakat yang sangat minim tentang pentingnya pencatatan perkawinan, akibatnya mempengaruhi masyarakat sehingga tetap melaksanakan perkawinan secara bawah tangan. Ada yang beranggapan bahwa perkawinan yang dicatat dan tidak dicatatkan sama saja. Padahal telah dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

7) Faktor sosial

Masyarakat sudah terlanjur memberikan stigma negatif setiap orang (laki-laki) yang menikah lebih dari satu (berpoligami) maka untuk menghindari stigma negatif tersebut, seseorang tidak mencatatkan perkawinannya tersebut kepada pejabat PPN, dan lebih memilih nikah bawah tangan. Dengan cara seperti ini tidak akan banyak diketahui oleh masyarakat luas bahwa ia berpoligami, walaupun pada akhirnya akan ketahuan juga dampak negatifnya bahkan lebih banyak.

8) Faktor sulitnya aturan berpoligami

Untuk dilakukannya perkawinan yang kedua, ketiga dan seterusnya (poligami) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, sesuai dengan syarat poligami yang dijeaskan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu harus mendapat izin dan persetujuan dari istri sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat memperkecil dilakukannya poligami bagi laki-laki yang menika tanpa alasan tertentu. Dan karena sulit untuk mendapatkan ijin dari istri, maka akhirnya suami melakukan nikah secara diam-diam.

9) Faktor masih adanya masyarakat yang melakukan kawin bawah tangan karena tidak ada yang mau mengambil tindakan yang tegas

Dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45 menyatakan :

(1) Kecuali ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka :

- a. Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 PP ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 75.00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);
- b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 PP ini dihukum dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 75.00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan pelanggaran.

c. Akibat Perkawinan Bawah Tangan

Perkawinan yang dilaksanakan secara bawah tangan, yang hanya berdasar kepada aturan syari'at Islam sehingga tidak mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan oleh pejabat PPN sebagai amanat undang-undang, maka perkawinan tersebut tidak sah karena tidak diakui oleh negara, karena melanggar aturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang seharusnya ditaati sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran.

Kalau perkawinan itu tidak diakui oleh Negara, berarti segala hal yang berhubungan dengan perkawinan tersebut juga tidak dianggap sebagai istri sah, sehingga ia tidak berhak mendapatkan warisan dari suaminya dan

bahkan kalau suaminya mau meninggalkannya maka ia tidak berhak menuntut apa-apa dari suaminya.

Sebenarnya perkawinan secara bawah tangan berdampak negatif terhadap suami dan istri, maupun terhadap anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinannya itu, namun kalau dicermati secara mendalam, maka akan diketahui bahwa dampak negatif akibat perkawinan bawah tangan lebih banyak dialami atau diderita oleh wanita (istri) dan anak-anaknya dibanding dengan yang dialami oleh suaminya.

Orang-orang yang melakukan perkawinan bawah tangan menganggap bahwa ada sisi positif dari perkawinan tersebut apabila dilihat dari segi sosial kemasyarakatan, antara lain dapat menutupi rasa malu bagi diri dan keluarganya kalau sudah terlanjur hamil sebelum menikah, maka perkawinan secara bawah tangan dapat dijadikan penutup aib dalam keluarga, sehingga tidak terkesan anaknya lahir tanpa bapak. Kadang-kadang juga untuk menyelamatkan seseorang yang masih terikat dengan iktan dinas tempatnya bekerja karena ada persyaratan belum bisa menikah dalam batas waktu tertentu. Namun karena terlanjur berhubungan badan dan hamil sebelum menikah, maka cara mengatasinya agar tidak diketahui oleh atasannya adalah menikah secara bawah tangan.

Adapun dampak negatif perkawinan bawah tangan terhadap perempuan (istri) adalah sebagai berikut :

- 1) Tidak diakui sebagai istri, karena perkawinan tidak dianggap sah.
- 2) Terabaikan hak dan kewajibannya.

- 3) Tidak berhak atas nafkah, warisan dan pembagian harta bersama.
- 4) Tidak memberikan kepastian hukum.
- 5) Menyulitkan untuk mengidentifikasi status seseorang sudah menikah atau belum.
- 6) Adanya keresahan/kekhawatiran, melaksanakan perkawinan bawah tangan dikarenakan tidak memiliki akta nikah.
- 7) Sanksi sosial dari masyarakat terhadap pelaku perkawinan bawah tangan.
- 8) Sulit bersosialisasi.
- 9) Menyulitkan masyarakat untuk memberikan kesaksiannya jika kelak ada persoalan-persoalan yang menyangkut kedua mempelai.
- 10) Adanya anggapan poligami terhadap pelaku perkawinan bawah tangan.

Dampak negatif perkawinan bawah tangan bukan hanya diderita oleh perempuan (istri), akan tetapi juga oleh anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Diantara dampak negatif perkawinan bawah tangan terhadap anak-anak secara hukum yang lahir dari perkawinan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.
- 2) Anak tidak berhak atas nafkah, warisan, dan hak-hak lainnya.
- 3) Tidak diterima mendaftar di sekolah.

- 4) Anak hasil perkawinan bawah tangan rentan menjadi korban eksploitasi.

Masih banyak lagi hal-hal yang diakibatkan oleh perkawinan bawah tangan yang dilakukan oleh kedua orang tua yang tidak bertanggung jawab, karena pertanggung jawaban orang tua yang sesungguhnya adalah ketika orang tua dari anak-anak yang lahir melangsungkan perkawinannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia, agar anak-anak yang lahir dapat dipertanggung jawabkan kelangsungan hidupnya dan terpenuhi hak-haknya sebagai anak.¹⁸

5. Pencatatan Perkawinan

Untuk kondisi saat ini, pencatatan perkawinan dipandang sebagai sesuatu yang sangat urgen sekali, karena menyangkut banyak kepentingan. Perkawinan bukan hanya ikatan antara mempelai laki-laki dan perempuan, akan tetapi merupakan penyatuan dua keluarga besar yang masing-masingnya punya hak dan kepentingan dari perkawinan tersebut. Dilangsungkannya perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah adalah dengan maksud Pegawai Pencatat Nikah dapat mengawasi langsung terjadinya perkawinan tersebut. Mengawasi disini dalam artian menjaga jangan sampai perkawinan tersebut melanggar ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Para pakar hukum berdebat tentang persoalan apakah pencatatan perkawinan tersebut merupakan sebuah keharusan dalam artian wajib, yakni

¹⁸ *Ibid*, Hal 104

menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan atau hanya merupakan syarat administratif, yang tentunya tanpa pencatatan pun perkawinan sudah dianggap sah.

Menyempurnakan akad nikah adalah wajib, namun ia tidak sempurna tanpa adanya pencatatan. Oleh sebab itu mencatatkan perkawinan pun hukumnya wajib. Banyak sekali kemaslahatan yang tercapai dengan adanya pencatatan perkawinan. Bahwa ada perbedaan pendapat tentang masalah pencatatan perkawinan ini adalah sesuatu yang lumrah, karena persoalan ini berada dalam koridor ijtihad yang tentunya kebenarannya bersifat relatif. Akan tetapi kita berkewajiban untuk mencari mana yang paling mendekati kebenaran.

Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975 bab II pasal 2 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkannya menurut Agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

Undang-Undang Perkawinan juga memberikan peringatan kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk tidak melangsungkan perkawinan bagi mereka yang tidak memenuhi persyaratan. UU No. 1 tahun 1974 pasal 20 menyatakan:

“Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan”.

Seperti diketahui pelaksanaan perkawinan itu didahului kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh calon mempelai maupun oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Calon mempelai atau orang tuanya atau wakilnya memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan kepada PPN (Pasal 3 dan 4 PP). Selanjutnya pegawai tersebut meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi, dan apakah tidak terdapat halangan menurut undang-undang. Demikian pula surat-surat yang diperlukan (Pasal 5 dan 6 PP) ini.

Apabila ternyata dari hasil penelitian itu terdapat halangan perkawinan atau belum dipenuhi syarat-syarat yang diperlukan maka keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya (Pasal 7 ayat (2) PP). Bila pemberitahuan itu telah dipandang cukup dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan serta tidak terdapat halangan untuk kawin, maka pegawai Pencatat membuat pengumuman pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, menurut formlier yang telah ditetapkan, dan menempenya di Kantor Pencatatan yang mudah dibaca oleh umum. Pengumuman serupa itu juga dilakukan di Kantor Pencatatan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman masing-masing calon mempelai (Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 9 PP).

Adapun pelaksanaan perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman tersebut (Pasal 10 PP). Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak ketiga guna mengajukan keberatan dan memohon pencegahan perkawinan itu apabila ia

berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan karena terdapat halangan atau karena salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dan pencegahan itu sendiri harus diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan itu akan dilangsungkan dengan memberitahukan hal itu kepada Pegawai Pencatat yang pada gilirannya memberitahukan hal itu kepada para calon mempelai.

Dengan memperhatikan tata cara dan ketentuan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan dan dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 10 PP). Dan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, maka akad nikahnya dilakukan oleh wali nikah atau yang mewakilinya.

Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan tersebut, maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, yang kemudian diikuti oleh kedua orang saksi, dan oleh wali nikah dalam hal perkawinan dilakukan menurut agama Islam. Penandatanganan tersebut juga dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang bersangkutan. Dan dengan selesainya penandatanganan tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara resmi (Pasal 11 PP).

Akta perkawinan ialah sebuah daftar besar (dahulu register nikah) yang memuat antara lain sebagai berikut (Pasal 12 PP) :

1. Nama, tempat dan tanggal lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman dari suami istri, wali nikah, orang tua dari suami istri, saksi-saksi, wakil atau kuasa bila perkawinan melalui seorang kuasa.
2. Surat-surat yang diperlukan seperti izin kawin (Pasal 6 Undang-undang). Dispensasi kawin (Pasal 7 UU). Izin poligami (Pasal 4). Izin dari Menteri Hankam Pangab bagi ABRI, perjanjian sebagai maksud Pasal 29 UU.
3. Dan lain lain.

Akta perkawinan itu oleh Pegawai Pencatat Perkawinan itu dibuat dua rangkap. Helai pertama disimpan di KUA atau KCS, sedangkan helai kedua dikirim ke Pengadilan daerah hukumnya mewilayahi Kantor Pencatatan tersebut (Pasal 12 PP). Hal ini untuk memudahkan pemeriksaan oleh pengadilan bila dikemudian hari terjadi talak atau gugatan perceraian. Sebab Undang-undang (Pasal 39) menentukan bahwa cerai hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, sedangkan cerai gugatan harus dengan putusan pengadilan (pasal 40 UU).

Kepada suami istri masing-masing diberikan “Kutipan Akta Perkawinan”, yang mirip dengan “Buku Nikah” sekarang (Pasal 13 ayat (2) PP), dengan isi yang sama. Dalam kutipan ini tentu saja tidak dimuat segala catatan yang terdapat dalam akta perkawinan itu sendiri, melainkan hanya beberapa catatan polos yang dipandang perlu. Kutipan Akta Perkawinan ialah bukti otentik bagi masing-masing yang bersangkutan, karena ia dibuat oleh pegawai umum (openbaar ambtenaar), perhatikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 (pasal 2 ayat (3)).

Untuk selanjutnya tugas PPN dan P3NTR sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. Bab II Pasal 6, tentang Pemberitahuan Kehendak Nikah sampai bab IX Pasal 22 tentang pembatalan perkawinan.

Bab III Pasal 7 dijelaskan bahwa PPN atau P3NTR yang menerima pemberitahuan kehendak nikah memeriksa calon suami, calon istri dan wali nikah, tentang ada atau tiaknya halangan perkawinan itu dilaksanakan baik halangan karena melanggar hukum munahakat atau karena melanggar Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan.

Jadi pasal ini adalah mempunyai aspek pelanggaran:

1. Terhadap hukum agama;
2. Terhadap peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.

Oleh karena itu, apabila PPN atau P3NTR menerima pemberitahuan kehendak nikah, segera memeriksa dengan teliti calon suami, calon istri dan wali nikah. Apabila ternyata telah memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah atau hukum munahakat, pemberitahuan tersebut dapat diterima dan sebaliknya, apabila ternyata tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah maka dapat diadakan pencegahan sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. Bab V penolakan kehendak nikah pasal 17, 18 bahwa setelah diadakan pemeriksaan ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh PPN atau P3NTR diharuskan menolak perkawinan dimaksud, dengan memberikan surat penolakan kepada yang bersangkutan

serta alasan penolakannya. Untuk selanjutnya yang bersangkutan dapat mengajukan banding terhadap penolakan tersebut ke Pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. Kemudian Pengadilan Agama memeriksa penolakan itu.

B. Kerangka Konsep

Perkawinan merupakan gejala sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Perkawinan adalah suatu lembaga sosial sekaligus keagamaan. Perkawinan merupakan sunnatullah yang mengatur kehidupan manusia, baik perorangan maupun kelompok. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Melalui ikatan perkawinan hubungan laki-laki dan perempuan yang semula adanya larangan kemudian menjadi sesuatu yang halal dan diperbolehkan karena manusia beradab dan dihitung sebagai ibadah.

Namun demikian, ikatan perkawinan tidak jarang memunculkan persoalan hukum, salah satunya yaitu fenomena perkawinan bawah tangan yang masih banyak terjadi di kalangan masyarakat dengan berbagai macam alasan dan faktor yang diungkapkan saat ingin melaksanakan perkawinan secara sah menurut hukum positif.

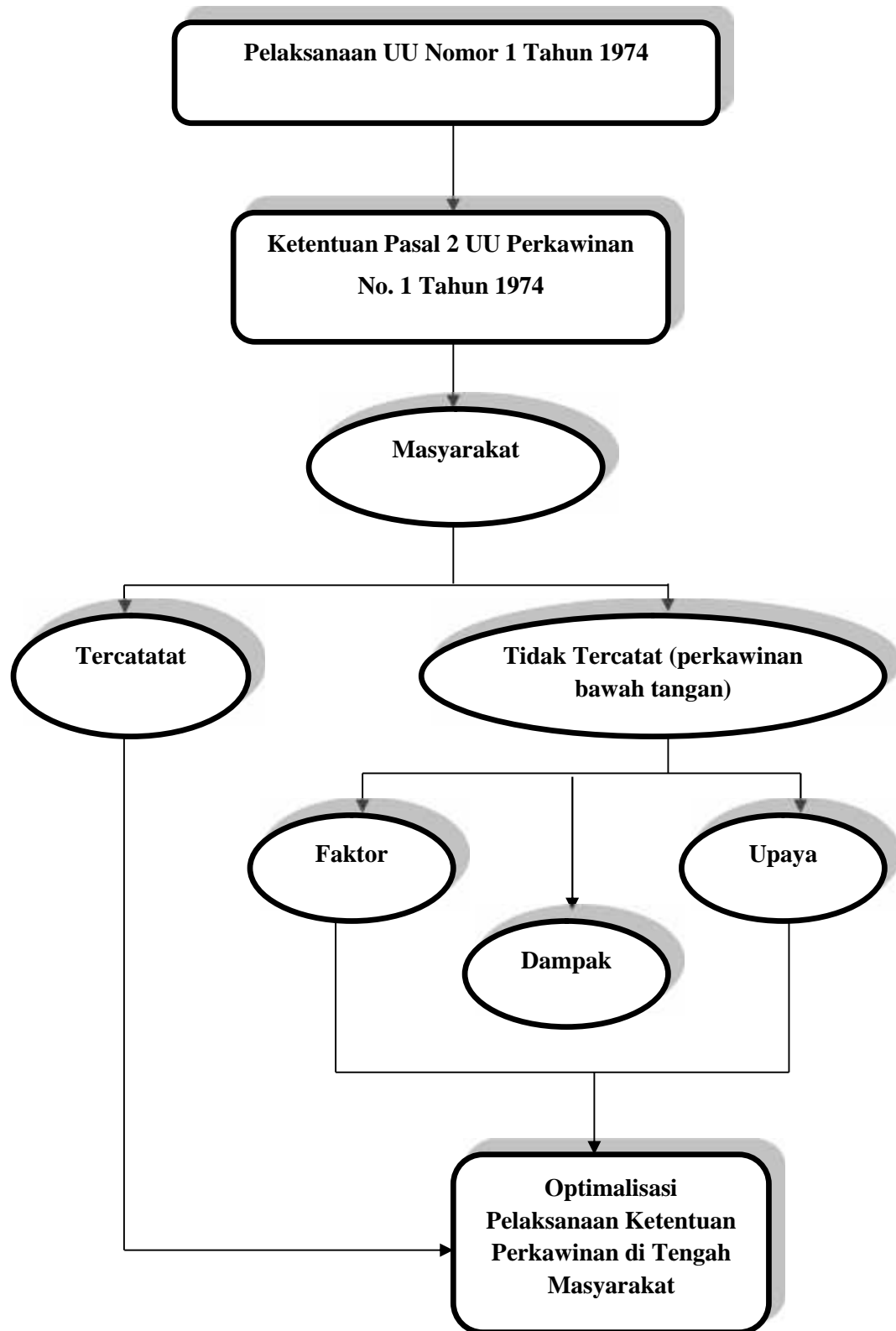
Perkawinan bawah tangan yaitu perkawinan yang dilakukan secara sah dengan syarat dan rukun perkawinan dalam Islam namun tidak dicatatkan pada PPN sesuai dengan yang diatur pada Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974.

Perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut kemudian mengakibatkan pasangan tersebut tidak mempunyai akta nikah dan kekuatan hukum.

Perkawinan bawah tangan akan berdampak merugikan bagi sang istri, baik secara hukum dan sosial. Begitu juga dengan sang anak, tidak sahnya perkawinan bawah tangan ini menurut hukum negara, memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Hal itu akan berpengaruh sangat dalam secara sosial dan psikologi anak tersebut.

Karena dampak dari perkawinan bawah tangan tersebut sangat luas, maka harus diadakannya upaya preventif dari berbagai pihak untuk mensosialisasikan terkait hal tersebut khususnya dampak yang akan ditimbulkan.

Skema Kerangka Konsep



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci¹⁹. Penelitian kualitatif ini memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat melakukan kegiatan penelitian untuk mendapatkan data dari responden. Lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan Tonra, yakni sebuah kecamatan di Kabupaten Bone dengan luas wilayah 130,47 Km² yang terdiri dari 11 desa dengan jumlah penduduk 11,519 jiwa.

C. Deskripsi Fokus

1. Perkawinan bawah tangan yang dimaksud di sini yaitu perkawinan yang dilakukan secara sah dengan syarat dan rukun dalam syariat Islam tetapi tidak didaftarkan pada PPN seperti yang diatur oleh Undang-undang Nomor Tahun 1974.

¹⁹ Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung; Remaja Rosdakarya, 1998) Cet. Ke 2, Hal. 63

2. Faktor pendorong perkawinan bawah tangan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu hal-hal apa saja yang menjadi alasan warga setempat sehingga melakukan perkawinan bawah tangan.
3. Akibat perkawinan bawah tangan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu hal-hal (negatif) apa saja yang menjadi hasil, atau yang ditimbulkan oleh perkawinan bawah tangan tersebut khususnya kepada istri dan anak.
4. Upaya pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu usaha-usaha atau langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam menangani dan meminimalisir kasus perkawinan bawah tangan tersebut.

D. Tahap-Tahap Penelitian

Pada penelitian ini terdapat dua tahap penelitian :

- a. Tahap persiapan penelitian, tahap ini dilakukan dengan mengawali mengobservasi tentang persoalan yang akan dikaji.
- b. Tahap pelaksanaan penelitian, pada tahap ini peneliti mulai terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yaitu data yang bersifat penjelasan dari data yang diperoleh yang terdiri dari data primer dan data sekunder.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis data yaitu :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari studi lapangan melalui wawancara dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan. Penetapan informan tersebut dilakukan dengan cara purposive sampling, yaitu peneliti mengambil orang yang menurut peneliti sesuai dengan ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. Data sekunder atau data kepustakaan yaitu data yang diperoleh dengan cara mengkaji berbagai literatur yang berhubungan dengan fenomena yang diteliti.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang dimaksud disini yaitu sebagai alat mengumpulkan data.

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai instrumen penelitian dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus.

G. Prosedur Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seorang responden, caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap

muka. Dalam hal ini responden yang diwawancarai adalah pelaku nikah dibawah tangan di Kecamatan Tonra.

b. Observasi

Metode pengambilan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada penelitian. Dalam hal ini observasi dilakukan di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone dengan mengamati fenomena perkawinan bawah tangan di daerah tersebut.

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan mengkaji perundang-undangan, sejumlah buku, tulisan dan karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan fenomena yang diteliti. Metode ini diharapkan bisa melengkapi data-data yang tidak ditemukan melalui wawancara dan observasi.

H. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam menguji keabsahan data peneliti menggunakan beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data ;

1. Ketekunan pengamatan, yaitu peneliti melakukan pengamatan yang cermat dan berkesinambungan mengenai fenomena yang diteliti. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan kredibilitas data yang diperoleh sehingga peneliti dapat mendeskripsikan secara akurat dan sistematis mengenai hal yg diteliti.
2. Triangulasi, yaitu peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data sebagai pembandingan terhadap data yang diperoleh.

I. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis non-statistik yaitu secara deskriptif. Analisis yang dilakukan tanpa menggunakan angka maupun rumusan statistik, melainkan penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian. Dimana dalam penelitian ini akan digambarkan secara jelas mengenai perkawinan bawah tangan yang dilakukan masyarakat kecamatan Tonra Kabupaten Bone.

Tahapan pertama yang dilakukan saat menganalisis data yaitu reduksi data, dimana peneliti memilih hal-hal yang pokok dengan memfokuskan pada hal-hal penting dan membuang yang tidak penting. Selanjutnya penyajian data, yaitu dimana peneliti melakukan penyajian sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Pada tahap ini peneliti mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan. Tahap akhir yaitu kesimpulan atau verifikasi, dimana pada tahap ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sekilas Tentang Kecamatan Tonra

a. Kondisi Geografis

Kecamatan Tonra adalah satu dari 27 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bone yang terletak di sebelah selatan Ibu Kota Kabupaten Bone Yakni \pm 50 Km. Yang berbatasan dengan :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Mare
- 2) Sebelah Timur berbatasan langsung dengan Teluk Bone
- 3) Sebelah Barat Berbatasan dengan Kec. Patimpeng
- 4) Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kec. Salomekko

Kecamatan Tonra memiliki luas wilayah 200.33 Km² dengan jumlah desa yang terdiri atas 11 desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Kecamatan Tonra secara administrative ada 11 (Sebelas) Desa, masing-masing :

1. Desa Bulu-bulu
2. Desa Samaenre
3. Desa Rappa
4. Desa Padatuo
5. Desa Libureng
6. Desa Gareccing

7. Desa Bonepute

8. Desa Muara

9. Desa Ujunge

10. Desa Bacu

11. Desa Bicoing

Luas administratif tiap desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Tonra dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1

Luas Desa/Kelurahan Dan Jarak Keadaan Tahun 2013

Kode	DESA/KELURAHAN	LUAS (Km ²)	JARAK (Km ²)		TINGGI DARI PERMUKAAN LAUT
			Dari Ibukota Kecamatan	Dari Ibukota Kabupaten	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
001	BICCOING	20,00	7	59	29
002	BACU	16,98	10	62	20
003	MUARA	17,63	9	51	29
004	UJUNGE	14,00	10	62	6
005	GARECCING	19,00	4	56	60
006	BONEPUTE	16,07	7	59	14
007	BULU-BULU	18,03	0	52	35
008	PADATUO	11,90	3	49	8
009	LIBURENG	20,19	4	48	26
010	SAMAENRE	14,02	6	46	30
011	RAPPA	32,50	13	55	47
JUMLAH		200,32			

Sumber : Sensus Podes

b. Kondisi Demografis

1) Komposisi Penduduk

Berdasarkan data dari Kantor Kecamatan Tonra, jumlah penduduk di Kecamatan Tonra Tahun 2016 adalah sebesar 13.869 Jiwa dengan jumlah total kepala keluarga 3.173 yang tersebar di 11 desa, mata pencaharian yang sangat bervariasi mulai dari, nelayan, petani, pedagang, pengrajin dan sebagian lagi Pegawai baik swasta maupun Negeri.

Di bawah ini tabel jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di setiap Desa/Kelurahan :

Tabel 2

Data jumlah penduduk laki-laki dan perempuan Perdesa

NO.	DESA	JENIS KELAMIN		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	BULU-BULU	1735	1903	3638
2.	SAMAENRE	517	523	1040
3.	PADATUO	732	792	1524
4.	BONEPUTE	326	356	682
5.	UJUNGE	308	396	704
6.	BACU	448	523	971
7	MUARA	346	370	716
8	BICCOING	742	765	1507
9.	GARECCING	502	523	1025
10.	RAPPA	432	465	897
11	LIBURENG	480	546	1026

Sumber : BPS Kab. Bone

Tabel 3
Penduduk Menurut Agama Dirinci Menurut Desa/Kelurahan Keadaan
Tahun 2013

Kode	DESA/KELURAHAN	ISLAM	KRISTEN		HINDU	BUDHA
			KATOLIK	PROTESTAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
001	BICCOING	1.425	-	-	-	-
002	BACU	965	-	-	-	-
003	MUARA	666	-	-	-	-
004	UJUNGE	675	-	-	-	-
005	GARECCING	1.043	-	-	-	-
006	BONEPUTE	650	-	-	-	-
007	BULU-BULU	3.396	-	3	-	-
008	PADATUO	1.565	-	-	-	-
009	LIBURENG	932	-	-	-	-
010	SAMAENRE	1.026	-	-	-	-
011	RAPPA	917	-	-	-	-
JUMLAH		13.141	-	3	-	-

Sumber : KUA Kecamatan

Sedangkan jika menurut agama di Kecamatan Tonra hanya ada dua macam agama dan didominasi oleh masyarakat yang beragama Islam sebanyak 13.141 jiwa dan yang beragama Kristen hanya terdapat 3 orang, meskipun berbeda namun keberagaman agama ini tidak menghalangi masyarakatnya hidup rukun.

2) Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan vital yang harus diberikan untuk mengembangkan cara berfikir seseorang atau pengetahuan seseorang sehingga memiliki bekal keterampilan serta kepribadian yang baik di masyarakat. Kecamatan Tonra sendiri sudah sangat banyak terdapat lembaga pendidikan yang cukup bagus sehingga memudahkan masyarakat mengakses pendidikan.

Tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Tonra sangat beragam, mulai dari tidak sekolah, tamat SD, tamat SMP, tamat SMA/ sederajat dan tidak sedikit pula masyarakat yang merupakan lulusan Perguruan Tinggi. Meskipun tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Tonra masih di dominasi oleh tamatan SMP/ sederajat.

Saat ini, tingkat kesadaran orang tua menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan formal sangat tinggi, sedangkan untuk pendidikan informal dapat dilihat dari aktifnya kegiatan keagamaan seperti TK/TPA, dan kegiatan kesenian seperti Sanggar Seni.

3) Mata Pencaharian

Ruang terbuka hijau di Kecamatan Tonra terbilang masih cukup banyak. Hal tersebut dapat dilihat pada penggunaan lahan di Kecamatan Tonra sebagian besar masih didominasi oleh sawah dan kebun. Sehingga mata pencaharian penduduk Kecamatan Tonra didominasi petani. Selain itu Kecamatan Tonra juga memiliki beberapa desa yang letaknya berdekatan dengan pantai, sehingga profesi nelayan

juga banyak menyumbang pendapatan masyarakat setempat. Meskipun demikian masih terdapat beberapa penduduk yang berprofesi lain seperti pedagang, wiraswasta, PNS, TNI/POLRI, Perawat, bidan dan Dokter.

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Bawah Tangan Pada Masyarakat Di Kecamatan Tonra

Perkawinan bawah tangan meski sah menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama. Selama perkawinan itu belum didaftarkan, perkawinan tersebut masih belum dapat memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum bagi perempuan sebagai istri dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Perkawinan jenis ini masih banyak dilakukan di kalangan masyarakat Indonesia dengan tingkat intelektual yang beragam. Perkawinan ini tidak hanya dilakukan oleh mereka yang memiliki pemahaman rendah mengenai pencatatan perkawinan, namun juga banyak dilakukan oleh orang-orang yang tau persis tentang pentingnya pencatatan perkawinan namun sengaja tidak mencatatkan perkawinannya, bahkan perkawinan bawah tangan juga banyak dilakukan oleh mereka yang paham agama (kyai).

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tonra menemukan fakta bahwa ternyata masih banyak perkawinan yang tidak dicatat di KUA setempat, hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan pengesahan

perkawinan (isbat nikah) di Pengadilan Agama setempat untuk memperoleh pengesahan perkawinan mereka secara hukum Negara dalam sebuah program sidang keliling. Salah satu faktanya, bahwa mereka tidak mencatatkan perkawinannya adalah karena alasan mahal nya biaya pencatatan perkawinan. Fenomena mahal nya biaya pencatatan perkawinan ini harus jadi catatan penting bagi para pengambil keputusan untuk menekan biaya pencatatan perkawinan seminimal mungkin agar kelompok masyarakat bawah tidak terhalang kepentingannya untuk memperoleh akte nikah. Terlebih lagi pernikahan dalam Islam adalah ibadah, sehingga sangat patut untuk dipermudah dan dibebaskan dari semua biaya pencatatan tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.

Di sisi lain, banyaknya perkara permohonan isbat nikah tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat mulai bangkit. Diharapkan dimulai dari meningkatnya kesadaran tersebut merupakan awal yang baik bagi terciptanya kesadaran masyarakat secara keseluruhan di daerah tersebut. Karena dengan kesadaran ini setidaknya kalau mereka menikahkan anak-anaknya nanti tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama yang pernah mereka lakukan.

Dari informasi yang diperoleh peneliti dapat diidentifikasi beberapa pasangan suami istri yang tidak melakukan pencatatan di KUA²⁰. Untuk meringkas penelitian ini penulis mengambil 15 sampel secara acak. Namun, beberapa responden yang ditemui tidak semuanya bersedia

²⁰ Hasil wawancara kepada Ibu Asmawati, pegawai KUA Kec. Tonra pada tanggal 11 April 2016

memberikan informasi, ada beberapa orang yang menolak untuk diwawancarai. Responden yang bersedia diwawancarai pun tidak semuanya memberikan informasi yang lengkap, penjelasan yang diberikan sangat singkat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 15 responden, hanya ada 8 responden yang yang penulis anggap telah cukup memberikan informasi yang lengkap mengenai data yang dibutuhkan, dapat penulis paparkan profil pasangan nikah bawah tangan yang ada di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone sebagai berikut :

1. Ibu Hasna

Seorang ibu RT yang berusia 37 tahun yang menikah pada tahun 2009. Alasannya ingin dinikahi secara bawah tangan itu karna proses pendaftaran yang memakan waktu lama dan ditambah dengan keadaannya pada waktu itu hamil diluar nikah sehingga ia malu mendaftarkan perkawinannya di KUA dan memberitahu kepada orang banyak.²¹

2. Ibu Suriani

Juga seorang ibu RT yang berusia 31 tahun. Ia menikah pada tahun 2007. Alasannya menikah bawah tangan adalah karna pada saat itu kurangnya pemahaman mengenai sah/tidaknya perkawinan tersebut di mata negara, yang ia tau yang penting sudah sah secara agama saja.²²

²¹ Hasil wawancara dengan pelaku kawin bawah tangan Ibu Hasna (bukan nama sebenarnya), pada tanggal 14 April 2016 di rumah ibu Hasna.

²² Hasil wawancara dengan pelaku kawin bawah tangan Ibu Suriani (bukan nama sebenarnya), pada tanggal 15 April 2016 di rumah ibu Suriani.

3. Ibu Isya

Seorang ibu RT yang berusia 68, ia menikah pada tahun 2012. Alasannya menikah bawah tangan adalah karena ketidaktahuannya mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan usia dari keduanya sama-sama sudah lanjut.²³

4. A dan L

Mereka adalah sepasang suami istri yang menikah pada tahun 1998. Ia bekerja sebagai pedagang dan suaminya bekerja sebagai buruh bangunan. Alasannya menikah bawah tangan adalah karena pada saat mereka menikah mereka jauh di rantauan dan tidak ingin direpotkan dengan prosedur yang berbelit-belit, menurutnya yang penting sah secara agama dan menghindari zina, kalau sudah balik ke kampung baru dicatatkan ke KUA.²⁴

5. S dan N

Mereka adalah sepasang suami istri yang menikah pada tahun 2008, keduanya bekerja sebagai petani. Alasannya menikah secara bawah tangan adalah karena dorongan orang tua. Si N adalah wanita yang dijodohkan dengan S oleh orang tuanya. Saat ini keduanya memiliki dua orang anak, anak pertamanya berumur 6 tahun dan anak kedua berumur 5 tahun.²⁵

²³ Wawancara dengan pelaku nikah kawin tangan ibu Isya (nama disamarkan), pada tanggal 15 April 2016 di rumah responden.

²⁴ Wawancara dengan pasangan kawin bawah tangan bapak A & ibu L (diinisialkan), pada tanggal 14 April 2016 di rumah responden.

²⁵ Wawancara dengan pasangan kawin bawah tangan bapak S & ibu N (diinisialkan), pada tanggal 16 April 2016 di rumah responden.

6. B dan H

Mereka adalah sepasang suami istri yang menikah secara bawah tangan. B berprofesi sebagai buruh bangunan dan H berprofesi sebagai buruh tani. Keduanya menikah pada tahun 2005, pada waktu itu B masih berumur 20 tahun dan H berumur 15 tahun. Alasan tersebutlah yang menyebabkan keduanya tidak mencatatkan perkawinannya di KUA setempat. Saat ini mereka telah dikaruniai 3 orang anak.²⁶

7. U dan M

Mereka adalah sepasang suami istri yang menikah pada tahun 2012. U berprofesi sebagai petani dan M berprofesi sebagai IRT, keduanya berasal dari desa Rappa. Bisa dikatakan jarak Desa rappa menuju KUA Kecamatan Tonra sangatlah jauh dan akses jalan yang sulit. Hal tersebutlah yang menyebabkan pasangan ini memilih nikah secara bawah tangan karena mengingat betapa repotnya harus mengundang PPN datang ke rumahnya. Juga terkait biaya pernikahan yang menjadi alasan mereka, dimana biaya jika mendatangkan PPn ke rumah adalah Rp 600.000, hal itu dinilai sangat menyulitkan mereka yang memiliki rumah dengan jarak tempuh belasan kilometer dari KUA. Belum lagi ditambah dengan biaya prosesi perkawinan adat bugis yang memakan biaya yang cukup besar, sedangkan kondisi ekonomi pelaku nikah bawah tangan ini sangat kurang.²⁷

²⁶ Wawancara dengan pasangan kawin bawah tangan, bapak B & ibu H (diinisialkan), pada tanggal 16 April 2016 di rumah responden.

²⁷ Wawancara dengan pasangan kawin bawah tangan bapak U dan ibu M (diinisialkan), pada tanggal 17 April 2016 via telpon

8. R dan N

Sepasang suami istri yang menikah pada tahun 2006. Keduanya adalah masing-masing duda dan janda, menjadikan alasan untuk menikah secara bawah tangan. Selain itu, nikah bawah tangan juga dilakukan untuk menghindari perzinahan maupun fitnah dari masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, keduanya bekerja sebagai nelayan.²⁸

3. Akibat Yang Ditimbulkan Perkawinan Bawah Tangan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Di Kecamatan Tonra

Meskipun masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, praktek perkawinan bawah tangan hingga kini masih banyak terjadi. Padahal, perkawinan bawah tangan jelas-jelas berdampak sangat merugikan bagi pihak perempuan. Dari aspek hukum, perkawinan bawah tangan mempunyai dampak negatif bagi perempuan yang menjadi isterinya maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, oleh karena itu haruslah dihindarkan. Perkawinan dibawah tangan jelas tidak mempunyai kekuatan hukum, masing-masing suami isteri tidak memiliki surat Akte Nikah sebagai pegangan dan bukti telah melaksanakan pernikahan yang sah.

²⁸ Wawancara dengan pasangan kawin bawah tangan, bapak R dan ibu N (diinisialkan), pada tanggal 19 April 2016 di rumah responden.

Berikut ada beberapa akibat yang diungkapkan pelaku saat diwawancarai mengenai akibat dari perkawinan bawah tangan yang dilakukan :

Ibu Hasna mengatakan bahwa :

“Saya sangat menyesal dan sedih karena perkawinan saya dengan suami saya tidak berlangsung lama. Saat anak saya berusia satu tahun, saya ditinggalkan suami untuk merantau. Namun saat sekitar sepuluh bulan kepergian suami saya diperantauan, suami saya tidak pernah lagi memberi kabar dan tidak pernah lagi memberi nafkah.”²⁹

Sedangkan Ibu Suriani, seorang ibu rumah tangga yang berumur 31 tahun mengungkapkan bahwa :

“Walaupun dalam pernikahan tidak terjadi kekerasan namun tetap saja saya merasa menyesal. Pertama karna perkawinan saya tidak tercatat di KUA sehingga keabsahannya diragukan oleh negara dan selain itu saya juga sempat mengalami kesulitan saat mengurus akte kelahiran anak saya. Namun saat ini saya sudah melakukan pendaftaran isbat nikah di KUA untuk mendapatkan surat nikah.”³⁰

Ibu Isya mengatakan bahwa :

“Tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan karna kami sudah sama-sama sudah berusia lanjut dan tidak mempunyai anak serta sampai saat ini kami masih hidup dalam keadaan tenang dan bahagia.”

²⁹ Wawancara dengan pelaku kawin bawah tangan Ibu Hasna (bukan nama sebenarnya), pada tanggal 14 April 2016 di rumah responden.

³⁰ Wawancara dengan pelaku kawin bawah tangan Ibu Suriani (bukan nama sebenarnya), pada tanggal 15 April 2016 di rumah responden.

Ibu L mengatakan bahwa :

“Kalau akibatnya saya tidak terlalu merasakannya karena selama menikah kami hidup bahagia dan dikaruniai 3 orang anak, hanya saja kami sempat mengalami kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak kami. Dan untuk menghindari akibat yang lebih fatal nantinya, kami telah melakukan isbat nikah pada tahun 2011 yang lalu.”³¹

Ibu N mengatakan bahwa :

“Akibat yang saya rasakan dari perkawinan ini yaitu kadangkala saya merasa malu bersosialisasi dengan orang-orang disekitar karna bisa saja masyarakat beranggapan bahwa perkawinan dilakukan sebagai upaya untuk menutupi aib, walaupun sebenarnya hal tersebut tidak benar. Saya juga khawatir dengan status saya sebagai istri yang hanya sah secara agama saja dan tidak memiliki bukti sebagai istri yang sah secara hukum, bisa menjadikan suami saya berlaku seenaknya suatu saat nanti serta kekhawatiran dengan nasib anak-anak saya nanti.”³²

Ibu H mengatakan bahwa :

“Saat ini saya sudah memiliki 3 orang anak. Selama menikah, saya pernah mendapat perlakuan kasar dari suami saya. Karna hal itu sangat merugikan bagi saya, dan tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang lebih parah kedepannya, karena saya paham betul akibat dari perkawinan bawah tangan yang saya lakukan waktu itu, saya sudah melakukan pendaftaran isbat nikah untuk mendapatkan akta nikah dan juga untuk menyelamatkan hak anak-anak saya jika suatu saat nanti terjadi perceraian.”³³

³¹ Wawancara dengan pelaku kawin bawah tangan Ibu L (diinisialkan), pada tanggal 15 April 2016 di rumah responden.

³² Wawancara dengan pelaku kawin bawah tangan Ibu N (diinisialkan), pada tanggal 16 April 2016 di rumah responden.

³³ Wawancara dengan pelaku nikah bawah tangan Ibu H (diinisialkan), pada tanggal 16 April 2016 di rumah responden.

4. Upaya-upaya pemerintah dalam meminimalisir terjadinya perkawinan bawah tangan di Kecamatan Tonra

Perkawinan yang sah menurut Islam adalah perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun sahnya perkawinan. Tetapi sahnya perkawinan ini dimata agama juga harus diikuti lagi dengan sah menurut hukum negara. Seperti yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 :

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundangan yang berlaku.”

Namun pada kenyataan saat ini, masih banyak masyarakat Islam di negara kita ini yang melangsungkan perkawinan hanya secara agama, tidak mencatatkannya di KUA atau biasa disebut dengan perkawinan bawah tangan.

Seperti dengan yang dikemukakan oleh Kepala KUA Kecamatan Tonra:

“Yang dimaksud dengan perkawinan bawah tangan yaitu perkawinan yang dilakukan secara sah menurut agama Islam tetapi tidak mencatatkannya di Kantor Urusan Agama sehingga pelakunya tidak memiliki surat nikah. Perkawinan bawah tangan tidak sah menurut hukum dan perkawinan jenis ini tidak diperbolehkan”.³⁴

³⁴ *Ibid*

Karena dalam realitas masyarakat saat ini masih sangat banyak ditemukan masyarakat yang melakukan perkawinan bawah tangan maka sangat perlu adanya upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir terjadinya perkawinan bawah tangan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala KUA Tonra mengatakan pernah melakukan berbagai usaha untuk meminimalisir perkawinan bawah tangan tersebut.

“Kami dari pihak KUA sudah sering melakukan berbagai usaha untuk mengurangi terjadinya perkawinan bawah tangan di Kecamatan Tonra ini karena melihat masih banyaknya masyarakat yang tidak memiliki akta nikah, hal ini dapat dilihat dari banyaknya permohonan isbat nikah”.³⁵

Adapun usaha-usaha yang pernah dilakukan yaitu :

1. Memberikan penyuluhan tentang pentingnya pencatatan perkawinan melalui sambutan-sambutan di peringatan acara keagamaan.
2. Memberikan kemudahan kepada masyarakat ingin melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum dengan menugaskan P3N di setiap desa yang ada di Kecamatan Tonra.
3. Melakukan sosialisasi mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan menjelaskan tentang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan lain yang terkait dengan pencatatan perkawinan melalui rapat koordinasi tingkat Kecamatan.

Demikianlah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tonra dalam meminimalisir terjadinya perkawinan bawah tangan di Kecamatan Tonra. Meskipun pada kenyataannya masih ada saja sebagian masyarakat yang merasa malas dan enggan untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama.

B. Pembahasan

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Bawah Tangan Pada Masyarakat Di Kecamatan Tonra

Suatu perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia harus dipayungi oleh dasar-dasar hukum yang mengatur tentang perkawinan itu sendiri. Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan secara Islam maka dasar hukum utama yang harus dipenuhi adalah hukum syariat Islam berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka perkawinan yang telah dijalankan berdasarkan hukum utama tersebut di atas sudah sah adanya perkawinan yang terjadi kalau dilaksanakan di Negara yang berdasar hukum Islam semata, termasuk bagi umat Islam Indonesia yang melangsungkan perkawinan sebelum adanya undang-undang yang mengatur tentang perkawinan.

Ikatan perkawinan tidak hanya untuk menghalalkan ikatan biologis (sex) semata, atau tidak hanya untuk mendapatkan keturunan semata, akan tetapi lebih dari itu yakni untuk membina keluarga yang bahagia penuh cinta kasih, menentramkan jiwa dan berakhir dengan diperolehnya

kebahagiaan lahir bathin. Kebahagiaan sebagai wujud manifestasi dari kesejahteraan lahir bathin warga negara merupakan salah satu tujuan Indonesia merdeka dan oleh karena itu Negara berkepentingan untuk melindungi kepentingan warga negaranya, kemudian lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta diikuti berbagai peraturan teknis lainnya.

Walaupun perkawinan di Indonesia telah diatur lahirnya Undang-Undang tentang Perkawinan, namun secara defakto pelaksanaan perkawinan oleh masyarakat Indonesia masih banyak yang melangsungkan perkawinan seperti ketika belum lahirnya Undang-Undang tentang perkawinan yang sering diistilahkan dengan “*kawin sirri*” atau “*kawin bawah tangan*”, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam dengan memenuhi syarat dan rukun sah perkawinan menurut agama namun tidak melalui pencatatan dan pengawasan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan. Karena sudah dianggap sah, akibatnya banyak perkawinan yang tidak dicatatkan. Bisa dengan alasan biaya yang mahal, prosedur berbelit-belit atau untuk menghilangkan jejak dan bebas dari tuntutan hukum dan hukuman administrasi dari atasan, terutama untuk perkawinan kedua dan seterusnya (bagi pegawai negeri dan ABRI).

Meski perkawinan yang dilakukan sah menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama. Selama perkawinan itu belum

didaftarkan, perkawinan tersebut masih belum dapat memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum bagi perempuan sebagai istri dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Berdasarkan dari kasus-kasus yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat berbagai macam alasan yang menjadi faktor terjadinya perkawinan bawah tangan pada masyarakat di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone :

Pertama, Menghindari syarat dan prosedur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kecendrungan masyarakat melakukan perkawinan bawah tangan yaitu disebabkan karna alasan untuk menghindari syarat dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan banyaknya syarat dan panjangnya prosedur yang harus dilalui oleh orang yang akan melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum negara membuat pihak yang ingin melangsungkan pernikahan tidak sabar sehingga mereka menempuh cara yang sangat praktis dan tidak memerlukan waktu yang panjang juga tidak perlu membutuhkan biaya yang banyak bahkan tidak perlu melibatkan pihak lain dari unsur pemerintah, cukup dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama.

Sebagai contoh, seseorang yang masih berusia di bawah 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki sudah terlanjur terjebak dalam pergaulan bebas dan harus dinikahkan maka satu-satunya jalan untuk

mensahkan hubungan mereka yaitu dengan jalan menikah secara bawah tangan. Karena secara administratif belum memenuhi salah satu syarat batas usia untuk melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum negara, disamping itu juga karna sudah terlanjur hamil dan kehamilan diluar nikah tersebut dianggap aib bagi keluarga khususnya bagi perempuan jadi mereka malu mencatatkan pernikahan mereka d KUA.

Kedua, Kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Masih banyak di antara masyarakat yang belum menyadari dan memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Barangkali pencatatan perkawinan itu hanya dipandang sekedar soal administrasi, belum dibarengi dengan kesadaran sepenuhnya akan segi-segi manfaat dari pencatatan perkawinan tersebut. Dengan minimnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sehingga mereka beranggapan bahwa perkawinan yang dicatatkan dan tidak dicatatkan sama saja, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki akibat hukum. Padahal pencatatan perkawinan yang merupakan perintah undang-undang itu sesungguhnya mempunyai tujuan penting, yakni proses dokumentasi atas perbuatan hukum perkawinan itu sendiri sehingga kemudian akan memberikan perlindungan hukum bagi suami isteri yang bersangkutan beserta anak keturuannya di kemudian hari. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat ini tentunya disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Meskipun sebagian dari mereka sudah paham

mengenai pentingnya pencatatan perkawinan namun mereka hanya sekedar paham dan tidak tergerak untuk hal yang seharusnya.

Ketiga, Dorongan Orang Tua. Di daerah tertentu, sebagian orang tua akan lebih senang bila yang menikahnya atau menikahkan anaknya adalah seorang kyai/tokoh agama setempat, ketimbang dinikahkan oleh penghulu yang ditunjuk oleh pemerintah (KUA). Biasanya alasan ini juga dibarengi dengan alasan-alasan lain, misalnya karna keluarganya turun temurun melakukan perkawinan bawah tangan (tradisi) atau biasa juga dibarengi dengan alasan ekonomi.

Keempat, Menghindari Hal-hal yang Dilarang Agama. Alasan ini merupakan alasan yang cukup mempengaruhi masyarakat melakukan perkawinan secara bawah tangan. Di tambah pula di daerah-daerah tertentu kepercayaan yang mendalam terhadap tokoh agama (kyai) juga mewarnai terjadinya ini. Di daerah tertentu, mereka lebih senang bila yang menikahnya atau menikahkan anaknya seorang kiai, ketimbang dinikahkan oleh penghulu yang ditunjuk oleh pemerintah (KUA).³⁶ Masyarakat sudah terlanjur berarsumsi bahwa yang terpenting sudah sah secara agama dan agar terhindar dari zina tanpa memikirkan akibat selanjutnya dari perkawinan yang dilakukan tersebut. Dengan menikah secara bawah tangan terlebih dahulu maka paling tidak pasangan pria dan

³⁶ Rochimah, Muzaiyanah, *Nikah Siri: Dampak Bagi Isteri Dan Anak*, (Surabaya: Jauhar, 2007), hal 34.

wanita yang sedang memandu kasih tidak terjerumus pada lubang dosa dan nista.

Dari beberapa alasan yang menjadi faktor yang menyebabkan masyarakat di Kecamatan Tonra melakukan perkawinan bawah tangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas alasan mereka lebih dominan kepada masalah kebutuhan pribadi, maksudnya yaitu bukan karena masalah pada lembaga pencatatan nikah dan aparturnya. Dari pernyataan yang dikemukakan dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dari alasan-alasan yang diungkapkan, yang mendasari masyarakat di Kecamatan Tonra melakukan perkawinan bawah tangan adalah karna kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terutama calon pengantin wanita terhadap pentingnya pernikahan harus didaftar dan dicatat lewat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA), hal tersebut juga dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Meskipun para pelaku perkawinan bawah tangan tersebut memiliki tingkat intelektual yang beragam, namun sebagian dari pelaku perkawinan bawah tangan didominasi oleh mereka yang mendapatkan pendidikan hanya sampai di bangku sekolah dasar. Karena minimnya pengetahuan dan pemahaman seorang terhadap pentingnya pencatatan perkawinan, maka dia rela dinikahi/menikahi secara bawah tangan. Meskipun sebagian kecil dari mereka sudah paham mengenai pentingnya pencatatan perkawinan namun mereka hanya menyadari dan tidak tergerak untuk hal yang seharusnya khususnya pencatatan perkawinan ini. Walaupun dampak

negatif dari pernikahan tersebut sangat besar dan berbuntut panjang terutama bagi mempelai wanita (istri) dan anak-anak dari hasil pernikahannya tersebut. Mereka yang melakukan perkawinan bawah tangan tidak memikirkan nasib dan masa depan anak-anak mereka kelak, anak suatu hari nanti akan membutuhkan akte kelahiran untuk administrasi pendidikan ataupun hal lainnya. Sedangkan akte kelahiran hanya dapat dibuat jika orang tua memiliki akta nikah.

Agenda penting yang perlu dikembangkan oleh sejumlah pihak yang berhubungan dengan masalah ini adalah bagaimana membangun kesadaran kaum hawa tentang bagaimana pentingnya menikah secara resmi yang dicatatkan oleh pejabat yang berwenang. Karna jika selanjutnya ada korban dari perkawinan bawah tangan tersebut khususnya kepada istri, bukan menjadi tanggung jawab siapa-siapa melainkan tanggung jawabnya sendiri.

Pencatatan secara resmi adalah suatu hal yang harus dilakukan dalam perkawinan, baik menurut ketentuan agama maupun ketentuan negara. PP tentang pelaksanaan UU Perkawinan pada Pasal 45 ayat 1 menetapkan sanksi bagi yang tidak menghiraukan pencatatan perkawinannya dengan hukuman denda setinggi-tingginya sebesar Rp 7.500, demikian juga sanksi bagi pegawai pencatat yang melanggar ketentuan itu dihukum kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500. besarnya denda itu untuk saat ini memang terhitung sangat kecil, sehingga masih banyak pihak yang masih tdk mengindahkan ketentuan tentang aturan

pencatatan tersebut, padahal pada ayat 2 ditegaskan bahwa tindak pidana tersebut masuk dalam kategori pelanggaran terhadap Undang-undang.

2. Akibat Yang Ditimbulkan Perkawinan Bawah Tangan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Di Kecamatan Tonra

Perkawinan bawah tangan masih menuai pro dan kontra. Sebagian menilai, pernikahan tanpa legalitas sah dari negara itu sangat berpotensi menimbulkan masalah, terutama dalam hal-hal terkait hukum administratif kependudukan.

Hal ini tertuang pada UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di mana pada bab 1 pasal 2 ayat (2) mengenai dasar perkawinan, menyebutkan bahwa; "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Selain itu, dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 42 Ayat (1), disebutkan bahwa: "Anak yang sah adalah anak-anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Hal ini menjelaskan bahwa status anak yang terdata, memiliki hubungan darah dengan kedua orang tuanya yang juga dinikahkan secara terdata oleh negara.

Perkawinan bawah tangan ini bermasalah dalam pandangan hukum negara karena tidak dapat dibuktikan dengan sebuah Akta Nikah, sedangkan Akta Nikah hanya dapat dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), satu-satunya alat bukti perkawinan adalah Akta Nikah. Ketika

perkawinan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki dokumen resmi yang bisa menjadi alat bukti dihadapan majelis peradilan ketika terjadi masalah perkawinan.

Belum lagi, dalam beberapa kasus tentang hak anak hasil perkawinan bawah tangan tersebut, kerap ditemui sejumlah potensi masalah dalam pengurusan hak hukum, seperti masalah akta kelahiran, nafkah, maupun mengenai hak waris.

Walaupun secara agama perkawinan bawah tangan sah namun apabila tidak dicatatkan di KUA atau Kantor Catatan Sipil maka menurut hukum negara belum ada perkawinan yang terjadi, akibatnya anak-anak yang dilahirkan dianggap tidak sah pula secara hukum. Seorang isteri dalam perkawinan bawah tangan (nikah sirri) tidak mempunyai perlindungan secara hukum.

Orang yang melakukan perkawinan bawah tangan memang menganggap bahwa ada sisi positif dari perkawinan tersebut apabila dilihat dari sosial kemasyarakatan, antara lain dapat menutupi rasa malu bagi diri sendiri dan keluarganya kalau sudah terlanjur hamil duluan sebelum menikah, maka perkawinan bawah tangan dapat dijadikan sebagai penutup aib bagi keluarga dan agar tidak terkesan bahwa anaknya lahir tanpa bapak. Selain itu perkawinan bawah tangan juga biasanya dilakukan untuk menghindari perzinahan, hilangnya kekhawatiran berzina alasan inilah yang kadang melatar belakangi dilakukannya perkawinan

bawah tangan, baik yang dilakukan orang dewasa maupun remaja yang masih sekolah ataupun kuliah. Dari pada terjerumus ke dalam perzinahan atau berbuat dosa, maka solusinya adalah kawin secara bawah tangan.³⁷

Meskipun perkawinan bawah tangan memiliki sisi positif, namun perkawinan yang dilakukan secara bawah tangan tersebut lebih banyak mendatangkan mudharat dibanding kemaslahatan bagi pelakunya, khususnya bagi istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Sebelum membahas mengenai akibat yang ditimbulkan dari perkawinan bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Tonra, terlebih dahulu akan dipaparkan akibat suatu perkawinan yang sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah sebagai berikut :

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- (4) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, rumah tempat kediaman yang dimaksud ditentukan oleh suami isteri bersama.
- (5) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (6) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

³⁷ Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Jurnal Kepenghuluan Volume 1 Nomor 1 Juli-November 2015*. (Makassar : Kemenag, 2015), hal 106.

- (7) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.
- (8) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama.
- (9) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (10) Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
- (11) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Sedangkan berdasarkan dari pernyataan-pernyataan yang telah diungkapkan responden sebelumnya pada hasil penelitian, dapat dicermati beberapa akibat (negatif) yang ditimbulkan oleh perkawinan bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat Keamatan Tonra terkhusus kepada istri dan anak baik dari segi hukum maupun sosial :

Pertama, tidak dianggap sebagai istri yang sah.

Karena perempuan yang dikawini secara bawah tangan tidak mempunyai bukti berupa buku nikah, oleh karena itu perkawinannya dianggap tidak sah. Meskipun perkawinan yang dilakukan sah menurut agama dan kepercayaannya namun perkawinan tersebut tetap saja dianggap tidak sah oleh negara jika belum dicatatkan di KUA.

Kedua, tidak berhak atas nafkah.

Akibat lebih jauh dari perkawinan bawah tangan adalah, istri tidak berhak menuntut nafkah jika suaminya masih hidup dan tidak bertanggung jawab, tidak dapat menuntut warisan jika meninggal dunia karena pernikahannya tidak pernah dianggap ada menurut hukum Indonesia, dan tidak dapat menuntut harta gono-gini jika terjadi perceraian karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan bahwa mereka telah menikah.

Ketiga, terabaikan hak dan kewajibannya.

Seorang suami yang melakukan perkawinan bawah tangan akan mudah mengabaikan hak dan kewajibannya, baik secara lahir maupun batin, dan bisa saja meninggalkan istrinya kapan saja dia mau karena tak adanya alat bukti berupa buku nikah.

Keempat, rentan terjadi KDRT.

Keluarga yang terbentuk dari perkawinan bawah tangan rentan akan terjadi kekerasan dalam rumah tangganya. Sang suami bisa saja berlaku seenaknya terhadap istri bahkan terhadap anaknya karena tidak adanya perlindungan hukum sang istri akibat dari perkawinannya yang tidak sah.

Kelima, istri akan sulit bersosialisasi.

Istri yang menikah secara bawah tangan akan sulit bersosialisasi dengan masyarakat sekitar karena tidak jarang masyarakat yang

menganggapnya telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai istri simpanan.

Keenam, sulit mendapatkan akte kelahiran anak.

Sang anak akan sulit mendapatkan akte kelahiran karena salah satu kelengkapan administrasi yang dibutuhkan adalah foto kopi buku nikah orang tua. Bagi pasangan suami istri yang tidak mempunyai buku nikah, maka Kantor Catatan Sipil akan menerbitkan akte kelahiran anak tanpa mencantumkan nama bapaknya di akte tersebut. Penerbitan akte kelahiran seperti itu sama dengan akte kelahiran seorang anak yang tidak mempunyai ayah atau anak diluar nikah karena hanya dinisbahkan kepada ibunya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Yang jelas merugikan adalah, anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

Dari hal-hal yang telah dipaparkan tersebut, ternyata ada banyak hal negatif yang dapat ditimbulkan dari pencatatan perkawinan tersebut yang tentunya sangat merugikan pihak perempuan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan secara bawah tangan.

Jika dibandingkan dengan akibat hukum dari perkawinan yang dicatatkan yang juga telah dipaparkan sebelumnya, terlihat sangat jelas bahwa perkawinan bawah tangan lebih banyak mendatangkan kemudharatan dibanding kemaslahatan. Dari pemaparan tersebut, penulis memandang bahwa pencatatan perkawinan adalah hal yang sangat penting. Pencatatan perkawinan dapat menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan di mana perlu, terutama sebagai suatu alat-bukti tertulis yang otentik. Dengan adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain. Bukan hanya sebagai syarat administrasi belaka namun, pencatatan perkawinan juga dapat berfungsi untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap perkawinan.

3. Upaya pemerintah dalam meminimalisir terjadinya perkawinan bawah tangan di Kecamatan Tonra

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ikatan perkawinan tidak hanya untuk menghalalkan hubungan biologis (sex) semata, atau tidak hanya untuk mendapatkan keturunan semata, akan

tetapi lebih dari itu yakni untuk membina keluarga yang bahagia penuh cinta dan kasih, menentramkan jiwa dan berakhir dengan diperolehnya kebahagiaan lahir bathin. Begitu banyak persoalan sosial kemasyarakatan bahkan persoalan hukum yang timbul akibat dari ikatan perkawinan. Maka sudah seharusnya masalah perkawinan harus dilihat dari sudut sosial kemasyarakatan, sudut agama dan dari sudut pandang hukum negara.

Perkawinan yang sah menurut Islam adalah perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun sahnya perkawinan. Tetapi sahnya perkawinan ini dimata agama juga harus diikuti lagi dengan sah menurut hukum negara. Seperti yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 :

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundangan yang berlaku.”

Namun pada kenyataan saat ini, masih banyak masyarakat Islam di negara kita ini yang melangsungkan perkawinan hanya secara agama, tidak mencatatkannya di KUA atau biasa disebut dengan perkawinan bawah tangan.

Perkawinan yang sah akan banyak menimbulkan akibat hukum, sebaliknya perkawinan yang tidak sah di mata negara tidak mempunyai kekuatan hukum karena perkawinan tersebut tidak pernah dianggap ada oleh negara. Justru perkawinan bawah tangan hanya akan menimbulkan

banyak masalah baik dari sudut sosial maupun dari sudut hukum. Pihak yang akan dirugikan dalam hal ini adalah pihak perempuan (istri) dan anak yang dilahirkan, sedangkan untuk suami hampir tidak ada akibat negatif justru hanya akan menguntungkannya.

Karena dalam realitas masyarakat saat ini masih sangat banyak ditemukan masyarakat yang melakukan perkawinan bawah tangan maka sangat perlu adanya upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir terjadinya perkawinan bawah tangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Tonra yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, berikut dapat diuraikan beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meminimalisir terjadinya perkawinan bawah tangan :

Pertama, memberikan penyuluhan tentang pentingnya pencatatan perkawinan melalui sambutan-sambutan di acara keagamaan.

Salah satu usaha yang selalu dilakukan oleh pihak KUA yaitu memberikan penyuluhan kepada masyarakat setempat tentang pentingnya mencatatkan perkawinan melalui sambutan-sambutan yang diberikan dalam berbagai acara. Dalam setiap sambutan-sambutan yang diberikan selalu diusahakan untuk menyelipkan faedah/pentingnya mencatatkan perkawinan di KUA serta akibat-akibat negatif yang ditimbulkan dari perkawinan yang tidak tercatat. Hal ini bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat mengenai betapa pentingnya mencatatkan perkawinan agar memiliki akta

nikah sebagai alat bukti bahwa dirinya benar-benar telah melakukan perkawinan dengan orang lain. Salah satu bukti yang dianggap sah sebagai bukti adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Jika seseorang telah memiliki Akta nikah, maka tentunya orang tersebut telah memiliki dokumen resmi yang dapat dijadikan alat bukti di hadapan majelis peradilan jika terjadi sengketa yang berkaitan perkawinan.

Kedua, memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin melakukan pencatatan perkawinan dengan menugaskan P3N di setiap desa.

Upaya selanjutnya yang dilakukan adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan perkawinan yang sah secara hukum dengan menugaskan satu orang P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) di setiap desa yang ada di Kecamatan Tonra, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang mengalasankan jarak rumah yang jauh dengan KUA sehingga tidak melakukan pencatatan perkawinan. Dengan adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan serta peraturan prosedur pencatatan perkawinan yang tersusun rapi merupakan usaha yang sangat bagus dari pihak Kantor Urusan Agama untuk menarik minat masyarakat agar melangsungkan perkawinan yang dimaksud sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Ketiga, melakukan sosialisasi mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 serta peraturan lain yang terkait dengan pencatatan perkawinan melalui rapat koordinasi di tingkat Kecamatan.

Pihak KUA juga melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur pencatatan perkawinan serta menjelaskan Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 melalui rapat koordinasi di Kecamatan yang dihadiri oleh perwakilan dari setiap desa, kemudian diharapkan dari perwakilan tersebut yang kembali akan mensosialisasikannya ke masyarakat di desanya. Pihak KUA juga membuat pamflet yang dibagikan kepada masyarakat tentang prosedur pencatatan perkawinan, sehingga masyarakat tidak lagi bingung dengan bagaimana prosedur-prosedur yang harus dilakukan dalam mencatatkan perkawinan. Adapun prosedur dalam pencatatan perkawinan dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu dari pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan asal 9.

Itulah beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak KUA, sampai saat ini pihak KUA masih mencari upaya-upaya lain yang dapat dilakukan untuk menekan kecilnya angka perkawinan bawah tangan di Kecamatan Tonra. Dari upaya-upaya yang dilakukan tersebut setidaknya sudah ada sedikit kesadaran yang tumbuh dimasyarakat, hal ini dilihat dari banyaknya permohonan isbat nikah. Diharapkan dengan adanya kesadaran hukum pada masyarakat sehingga nantinya mereka terdorong melakukan perkawinan yang sah menurut hukum.

Upaya pemerintah untuk meminimalisir perkawinan bawah tangan akan semakin maksimal jika anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam menekan kecilnya angka perkawinan bawah tangan di Kecamatan Tonra. Kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah adalah jalan terampuh untuk meminimalisir ataupun mencegah perkawinan bawah tangan. Sehingga kedepannya tidak ada lagi masyarakat yang melakukan perkawinan bawah tangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan bawah tangan yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Tonra adalah : 1) Menghindari syarat dan prosedur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; 2) Kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat; 3) Dorongan orang tua; 4) Menghindari hal-hal yang dilarang agama.
2. Akibat dari perkawinan bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tonra terhadap istri dan anak yaitu :a. Tidak diakui sebagai istri yang sah; b. Tidak berhak atas nafkah; c. Terabaikan hak dan kewajibannya; d. Rentan terjadi KDRT; e. Istri sulit bersosialisasi; f. Sulit mendapatkan akte kelahiran anak;
3. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam meminimalisir perkawinan bawah tangan di Kecamatan Tonra adalah : a. Memberikan penyuluhan tentang pentingnya pencatatan perkawinan melalui sambutan-sambutan di acara keagamaan; b. Memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin melakukan pencatatan perkawinan dengan menugaskan P3N di setiap desa; c. Melakukan sosialisasi mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan menjelaskan tentang Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan lain yang terkait dengan pencatatan perkawinan melalui rapat koordinasi di tingkat Kecamatan.

B. Implikasi

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat merupakan dasar yang melatarbelakangi masyarakat melakukan perkawinan yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Karena minimnya pemahaman masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masyarakat seenaknya saja melakukan perkawinan yang tidak mengikuti ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun ada sebagian kecil dari mereka sudah mengetahui tentang peraturan perundang-undangan ini namun mereka hanya sekedar mengetahui namun mereka tidak tergerak untuk hal yang seharusnya khususnya pencatatan perkawinan ini.

Dengan demikian diharapkan adanya kesadaran hukum yang tumbuh pada tiap individu sehingga tidak ada lagi yang melakukan perkawinan bawah tangan.

C. Saran

Dari pembahasan secara menyeluruh mengenai fenomena perkawinan bawah tangan di Kecamatan Tonra, maka penulis memberikan saran untuk dapat dimengerti dan bermanfaat.

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk mengintensifkan sosialisasi-sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan sampai ke desa bahkan sampai ke desa terpencil sekalipun, agar semua masyarakat benar-benar sadar tentang pencatatan perkawinan.
2. Diharapkan adanya kesadaran hukum yang tumbuh pada tiap individu sehingga tidak ada lagi yang melakukan perkawinan secara bawah tangan, karena sudah memahami resikonya.
3. Diharapkan adanya pemberian sanksi yang tegas terhadap perkawinan yang tidak dilakukan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 agar masyarakat merasa segan untuk melanggarnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abd Kadir Ahmad (2006). *Sistem Perkawinan Di Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat*. Makassar: Indobis.
- Akhsin Muamar. *Nikah Bawah Tangan Versi Anak Kampus*. Depok : Qultum Media.
- Amir Syarifuddin (2006). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (2015). *Jurnal Kepenghuluan Volume 1 Nomor 1 Juli-November 2015*. Makassar: Kemenag.
- Hilman Hadikusuma (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Bandar Maju.
- Happy Susanto (2007). *Nikah Sirri Apa Untungnya ?*. Jakarta : VisiMedia.
- Irawan Suhartono (1998). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mardani (2011), *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mohd. Ramulyo Idris (2007). *HUKUM PERKAWINAN ISLAM Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Neng Djubaidah (2012). *PENCATATAN PERKAWINAN & PERKAWINAN TIDAK DICATAT Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sayuti Thalib (1929). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit UI Press.
- Soerjono Soekanto (2011). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerojo Wignjodipoero (1988). *Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.
- Syarifuddin Husain (2014). *Dinamika Hukum Nikah Kontemporer Di Indonesia Saat Ini*. Bone: Pondok Pesantren Al-Qur'an Ar-Rahman.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

C. THESIS

Rudin. 2011. *TINJAUAN YURIDIS DAN SOSIOLOGIS TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (Studi Kasus di Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon)*. PROGRAM PASCASARJANA KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON.

D. INTERNET

<http://gubukhukum.blogspot.co.id/2012/08/nikah-dibawah-tangan.html>
diakses pada tanggal 31 Januari 2016

https://www.academia.edu/10969799/NIKAH_DIBAWAH_TANGAN_DAM_PAK_DAN_SOLUSINYA diakses pada tanggal 18 Januari 2016

<http://iskandar-islam-indonesia.blogspot.co.id/2013/01/nikah-sirri-nikah-di-bawah-tangan-dan.html> diakses pada tanggal 17 Januari 2016

L

A

M

P

I

R

A

N

DOKUMENTASI

Sketsa peta kecamatan tonra



Kantor urusan agama kecamatan tonra



Wawancara dengan pelaku



Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Tonra



PEDOMAN WAWANCARA

Rumusan Masalah 1

Faktor apa yang mendorong terjadinya perkawinan bawah tangan pada masyarakat di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone ?

➤ Pelaku Nikah Bawah Tangan

1. Nama, Umur, Pekerjaan, Pendidikan Terakhir.
2. Pada tahun berapa anda menikah ?
3. Apakah benar pada saat anda menikah, anda tidak mencatatkan perkawinan anda di KUA ?
4. Apa alasan yang menyebabkan sehingga anda melakukan perkawinan bawah tangan ?

Rumusan Masalah 2

Bagaimana akibat perkawinan bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tonra Kabupaten Bone ?

➤ Pelaku Nikah Bawah Tangan

1. Apa yang anda rasakan setelah menikah ?
2. Bagaimana kehidupan rumah tangga anda ?
3. Apakah ada akibat negatif yang anda rasakan ?
4. Saat ini, apakah anda sudah memiliki akta nikah ?
5. Jika belum, apakah anda tidak ada niat untuk mensahkan perkawinan anda ini ?
Alasan !

Rumusan Masalah 3

Bagaimana upaya pemerintah daerah setempat dalam meminimalisir terjadinya perkawinan bawah tangan di tengah-tengah masyarakat ?

➤ Kepala KUA

1. Bagaimana pandangan bapak mengenai perkawinan bawah tangan ?
2. Pernahkan KUA melakukan sosialisasi agar masyarakat menikah dengan melibatkan KUA ?
3. Apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak KUA untuk meminimalisir dan mencegah hal tersebut ?

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap NURHIDAYAH, lahir di Bulu-bulu Kecamatan Tonra Kabupaten Bone pada tanggal 27 Januari tahun 1996, merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis adalah buah hati dari pasangan suami istri Muh. Ilyas dan Syamsiah. Penulis sekarang bertempat tinggal di Jalan Mapala Kompleks BTN Pemda Blok E21/28.

Pendidikan yang telah ditempuh penulis yaitu pada tahun 1999 penulis memulai pendidikan di Taman Kanak-kanak Kuru' Sumange' dan lulus pada tahun 2000, pada tahun 2000 penulis melanjutkan pendidikan di SDN 246 Bulu'-bulu' dan lulus pada tahun 2006, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Neg. 1 Tonra dan lulus pada tahun 2009, penulis kemudian melanjutkan ke SMA Neg. 1 Tonra dan lulus pada tahun 2012. Pada tahun 2012 penulis mendaftar di UNM kemudian lulus melalui tes SNMPTN tertulis dan terdaftar sebagai mahasiswa PPKn Universitas Negeri Makassar.